

# DI ANTARA KEBUTUHAN DEMOKRASI DAN KEMENANGAN POLITIK KEKERASAN

Konflik Papua Pasca Orde Baru <sup>1</sup>

oleh:

**Muridan S. Widjojo**

*Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

*This paper revolves around; firstly, the political struggle in Papua between the pro-democracy groups that consist of civil society organisations (CSO), individuals within Catholic churches, and indigenous people association of one of Papuan ethnic groups vis à vis the Indonesian government, its military units and the Freeport Indonesia Company (Freeport). Secondly, the paper discusses the emergence of new and old agents who make use of issues related to the Papuan demand for independence. The latter thereafter dominate the popular political theme and gain spontaneous popular supports.*

*In this paper I discuss the resurgence of religious movement, which takes form of demand of independence of “West Papuan Nation” and its impacts over the pro-democracy groups, military, bureaucracy, and the Papuans. The existing political struggle is analysed through the series of events in Papua from 1967 to 2001 in which I identify strategies and social practices of the agents to fight against or to conserve their domination...*

## **Pengantar**

Makalah ini membahas, pertama, pertarungan politik dan aktor-aktor yang terlibat di Papua antara kelompok Pro-Demokrasi yang muncul dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gereja Katolik, dan lembaga adat dari salah satu kelompok etnik Papua melawan dominasi politik militer dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) serta dominasi politik ekonomi oleh perusahaan multinasional PT Freeport Indonesia Company (Freeport). Kedua, kemunculan ke permukaan secara “tiba-tiba” aktor-aktor baru dan lama yang menggunakan isu kemerdekaan Papua di berbagai kota kabupaten yang secara spontan mendapatkan dukungan luas dari rakyat Papua.

Di sini dibahas sumber-sumber dan dampak meluasnya gerakan keagamaan yang muncul mengambil bentuk tuntutan kemerdekaan “bangsa-bangsa Papua Barat” itu terhadap kelompok Pro-Demokrasi, kelompok militer, birokrasi, dan bagi masyarakat Papua sendiri. Pertarungan politik itu dibaca dari berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat di Papua yang berlangsung sejak 1967 hingga 2001. Di dalam dinamika pertarungan itu diungkap berbagai strategi yang dikembangkan oleh masing-masing aktor untuk melawan atau mempertahankan dominasinya. Dalam perspektif transisi demokrasi di Indonesia, dari berbagai peristiwa yang ada, dapat diajukan pertanyaan apakah transisi politik pasca Orde Baru di Papua mengarah pada konsolidasi demokrasi ataukah sebaliknya penguatan kembali unsur-unsur otoritarian dalam bentuk dominasi militer dan birokrasi sipil.

Krisis politik Papua yang dibahas ini hendak menunjukkan kemacetan atau ketidakmampuan kelompok Pro-Demokrasi. Embrio gerakan Pro-Demokrasi ini, pertama, baru

---

<sup>1</sup> Paper ini ditulis di dalam kerangka “Proyek Penelitian Transisi Demokrasi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh LP3ES dan disponsori oleh The Ford Foundation pada tahun 2001.

tumbuh secara terbatas di Jayapura dan di Timika. Pemberdayaan dan pertumbuhan lembaga adat sebagai lembaga yang menjadi jembatan transisi masyarakat ke arah integrasi sosial dan politik baru tumbuh di Timika. Kedua, kondisi subyektif rakyat Papua yang sebagian besar masih hidup dalam paradigma tribalisme belum dapat diharapkan mendukung proses tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil. Perubahan politik nasional yang ditandai dengan terbukanya ruang aspirasi politik yang lebih beragam bukannya memperkuat gerakan Pro-Demokrasi dan pertumbuhan masyarakat sipil melainkan mendorong revivalisme “adat” dan etnonasionalisme rakyat Papua. Komplikasi politik ini ternyata tidak segera memperoleh resolusi politik yang memadai dan sebaliknya menjebak aktor-aktor politik baik di pihak negara maupun masyarakat pada lingkaran kekerasan yang tak berujung.

## 1. Peta Pertarungan

### 1.1. Akar Rumput Papua

Masyarakat Papua bukanlah suatu entitas yang homogen. Kepapuaan baru dibangun secara terbatas bersamaan dengan tumbuhnya lapisan kecil elit terdidik melalui Sekolah Pamong Praja yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada 1940-an. Di sana pendidikan administrasi pemerintahan dijalani. Pada kesempatan itu para pelajar Papua banyak berdiskusi tentang persoalan kepapuaan dan kemungkinan Papua Barat menjadi satu negara bangsa yang merdeka. Pada awal 1960-an sudah disiapkan bendera nasional, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Pada 1 Desember 1961 dengan bantuan Belanda diproklamasikan Negara Papua Barat.<sup>2</sup> Dari sini bibit nasionalisme Papua mulai tersemaikan.

Reaksi Pemerintah RI dan perkembangan politik berikutnya membuat Papua Barat kemudian diintegrasikan dengan RI. Identitas dan nasionalisme Papua terkubur sementara bersamaan dengan penggantian nama Papua Barat menjadi Irian Barat dan integrasi kehidupan sosial politik ekonomi dan kebudayaan Papua di bawah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belasan tahun kemudian, tepatnya sejak 1978, melalui kesenian identitas Papua pernah dibangun kembali oleh kelompok Mambesak Arnold Ap. Namun kepapuaan kembali terhambat karena Arnold Ap kemudian dipenjara oleh pemerintah RI di bawah Orde Baru. Menurut analisis pemerhati Papua di manca negara Arnold Ap kemudian dibunuh melalui suatu konspirasi yang melibatkan Kopassandha.<sup>3</sup>

Pada era reformasi, pada kurun 1998-1999, kepapuaan kembali dihidupkan sebagai identitas alternatif dari identitas “Irian Jaya” yang telah identik dengan Indonesia beserta penindasan dan praktik kolonialismenya. Perasaan satu identitas ini disatukan oleh memori penderitaan kolektif dan kongruensi aspirasi yang bersumber dari mitologi sebagian besar suku bangsa masing-masing tentang milenium baru dan mesianisme. Pada era reformasi penggunaan nama Papua menjadi penanda bagi aspirasi bersama itu. Kongruensi aspirasi dan identitas kepapuaan baru pada tahap yang sangat dini. Kepapuaan cenderung berhenti sebagai identitas yang dihayati secara “etnosentris” dan emosional.

Struktur-struktur masyarakat Papua yang terdiri dari kurang lebih 250 suku bangsa bersifat otonom satu sama lain. Setiap kelompok suku secara kultural mandiri dan unik, tidak tunduk pada yang lain, dan setiap suku memiliki kosmologi yang memandang dirinya sebagai pusat dari semesta. Setiap kepala suku atau pemimpin lokal tidak memiliki otoritas yang penuh kecuali sebagai juru bicara masyarakatnya. Interaksi yang terbatas di masa lalu belum memungkinkan tumbuhnya kesadaran budaya yang relativistik dan toleran. Oleh karena itu etnosentrisme menjadi persoalan dasar di dalam konsolidasi rakyat Papua. Di dalam kenyataan budaya semacam ini sulit tumbuh suatu kepemimpinan yang diakui oleh semua kelompok suku bangsa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Decki Natalis Pigay, 2000, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: Sinar Harapan) hal. 285.

<sup>3</sup> Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *West Papua: the obliteration of a people*, (London: Tapol) hal. 125-136.

<sup>4</sup> Bandingkan dengan studi yang sudah dilakukan oleh Johszua Mansoben, *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, (Jakarta-Leiden: LIPI-RUL).

Kekuatan orang Papua pada umumnya adalah kemampuan negosiasi di dalam konflik antarkelompok. Institusi resolusi konflik secara tradisional berkembang dan digunakan untuk mengakhiri suatu krisis hubungan antar kelompok. Tradisi negosiasi, terutama di kalangan orang pegunungan, digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan lain-lain. Perang suku atau jalan kekerasan baru diambil ketika negosiasi mengalami kebuntuan atau pihak yang bertikai memang secara kultural merupakan “musuh” permanen. Hanya saja mekanisme ini hanya berlaku di dalam intern kelompok suku. Di dalam konflik antar suku kecenderungan untuk mengambil jalan kekerasan masih sangat kuat.

Perang suku adalah habitus tradisional yang secara mental belum sepenuhnya hilang pada sebagian rakyat Papua. Kekerasan ditempatkan menjadi bagian inheren di dalam ritual dan hukum adat tertinggi untuk suatu resolusi konflik. Ini menjadikan kekerasan sebagai bagian dari pilihan-pilihan tindakan yang dianggap sah dan dalam momen tertentu dianggap “sakral.” Provokasi pihak lain atau pun pihak internal suku yang memanipulasi terminologi setempat dan menyentuh *moods* kelompok akan dengan mudah menghadirkan kekerasan baru.

Selama era Orde Baru sebagian besar rakyat Papua tumbuh bersama dengan teror dan kekerasan dari negara, baik itu kekerasan yang bersifat simbolik dalam bentuk sentralisme kebijakan pembangunan dan pengingkaran terhadap paradigma kebudayaan-kebudayaan Papua maupun kekerasan fisik oleh militer yang dikaitkan dengan pembangunan dan pemberantasan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Rakyat Papua tidak hanya disandera oleh operasi politik pemerintah bersama militer namun juga sekaligus perjuangan bersenjata OPM.

Pemerintah RI pada awal kehadirannya 1963—sesuai dengan yang dijanjikannya—diharapkan dapat memenuhi aspirasi rakyat akan kedamaian dan kemakmuran baru tetapi kenyataan sebaliknya yang diperoleh. Rakyat menjadi korban kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kemiskinan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan stigma OPM, rakyat menjadi korban dominasi politik birokrasi sipil dan militer. Sebagian rakyat melihat OPM sebagai alternatif perlawanan sejak 1970-an. Oleh karena itu perlawanan yang muncul di masa Orde Baru menggunakan simbol-simbol OPM kendati kadang-kadang kelompok pelakunya tidak terkait baik secara gagasan maupun secara organisasi dengan OPM.

Kelompok yang muncul di kota sesekali dengan simbol-simbol Papua Merdeka dalam bentuk unjuk rasa dan pengibaran bendera. Bagi mereka yang bergerak di hutan-hutan penyanderaan, kekerasan, dan pengibaran menjadi praktik simbolik perlawanan. Seluruh strategi itu tidak disadari telah menjerumuskan rakyat Papua lainnya dalam situasi “maju kena mundur kena.” Pada 1970-an Brian May mengutip sebuah tulisan di satu pintu rumah di Arso, sebelah selatan Jayapura, “Before me are bayonets (Indonesian troops), behind me are knives and arrows (OPM tribesmen).”<sup>5</sup> Pada akhirnya rakyat terseret menjadi korban kekerasan balik dari militer. Tidak disadari bahwa pilihan simbol dan praktik perlawanan itu justru melegitimasi kekerasan yang dilakukan oleh militer. Rakyat Papua Pegunungan Tengah adalah lapisan korban yang paling menderita dari strategi OPM dan praktik politik militer.

Fakta kultural yang penting untuk dicatat dari orang Papua adalah bahwa gerakan cargo cult atau kargoisme masih sangat populer di Papua. Tentang hal ini John Strelan<sup>6</sup> menulis bahwa *kultus kargo* berkaitan dengan gerakan-gerakan yang menekankan dan menggunakan ritus dan doktrin-doktrin religi dan magis untuk mencapai tujuan-tujuannya atau untuk memenuhi harapan-harapannya. Secara umum kultus kargo berarti semua gerakan yang mendambakan kedatangan kekayaan baik materi maupun rohani dengan cara apa pun walaupun caranya tidak memenuhi pandangan kriteria Barat. Kargoisme hanya menunjuk kepada doktrin-doktrin kargo, ideologi, mitos-mitos atau filsafat tentang kargo. Menurut Benny Giay pada prinsipnya kargoisme berhubungan dengan harapan atau impian masyarakat untuk mendapatkan pengakuan, status, kekayaan materi, kedamaian, dan kehidupan yang lebih baik.<sup>7</sup>

Sejak 1860 sudah ada laporan tertulis tentang gerakan-gerakan kargoisme. Pada waktu itu John Strelan menghitung sekitar 200 gerakan terjadi di berbagai tempat. Sejak kontak orang Papua dengan pendatang, dengan misionaris dan pejabat-pemerintah, gerakan ini semakin subur

<sup>5</sup> Brian May, 1978, “The United Nations fiasco” dalam *The Indonesian tragedy*, (London: Routledge) hal. 181.

<sup>6</sup> John G. Strelan, 1977, *Search for salvation*, (Adelaide: Lutheran Publishing House) hal. 10.

<sup>7</sup> Benny Giay, 1986, *Kargoisme di Irian Jaya*, (Jayapura: Region Press) hal. 3.

dan mengembangkan bentuk-bentuk barunya yang berorientasi pada kekayaan materi produksi Eropa dan Amerika. Berdasarkan hasil penelitian para antropolog dan teolog dapat dikatakan bahwa sebagian besar kelompok suku bangsa Papua memiliki tradisi ini. Pada orang Dani, misalnya, ada Nabelan Kabelan,<sup>8</sup> orang Amungme mempunyai Hai.<sup>9</sup> Di Biak orang menjalankan Koreri.<sup>10</sup> Di pantai selatan Papua, orang Kamoro memiliki Otepe.<sup>11</sup> Kata Schoorl, orang Muyu mempunyai Ot,<sup>12</sup> dan seterusnya.

Gerakan kerakyatan orang Papua yang menuntut kemerdekaan, mulai dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965 hingga PDP pada 2000 juga terkait dengan spirit gerakan kargoisme. Pengibaran bendera Bintang Kejora, misalnya, diperlakukan sebagai ritus untuk menyambut datangnya “kemerdekaan.” Kibarannya dianggap seperti panggilan suci pada leluhur. Mereka seakan-akan berdoa, “Datanglah KerajaanMu. Bebaskanlah kami dari peluru, sangkur, dan bayonet. Suburkanlah kebunku dengan batatas dan keladi. Kembalikan hutanku agar sagu dan babi tersedia untuk kerabatku. Bersihkan sungaiku agar ikan dan udang kembali melompat ke perahuku.”<sup>13</sup>

Di Biak, misalnya, pada 2-6 Juli 1998, kegiatan pengibaran bendera terlihat jelas dijiwai oleh gerakan Koreri. Selama lima hari orang Papua dengan berani mempertaruhkan nyawa mempertahankan bendera dan “berperang” melawan polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bendera sengaja dikibarkan di tempat yang tinggi yaitu menara air kota Biak agar dengan mudah terlihat dari laut. Mereka yakin bahwa kapal induk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bersama Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan segera datang untuk memberikan bantuan makanan, senjata, dan mengakui kemerdekaan Papua. Seperti di Biak, gerakan kargoisme selalu gagal memenuhi keyakinan dan harapan. Tetapi keyakinan akan penantian itu tidak pernah mati. Ia akan selalu hidup kembali suatu saat.<sup>14</sup>

## 1.2 Organisasi Papua Merdeka<sup>15</sup>

Uraian di atas tentang kandungan spirit kargoisme makin jelas dengan kutipan dari Brian May berikut ini:

“In West Irian there was conviction that freedom was assured by that Arbiter of Justice, that Omnipotent Power of Powers, the United Nations; if the Indonesians dared to remain in West Irian when it was clear that the people wanted them to go, the United Nations would send in forces to fight alongside the OPM. Just as people along the coast near Madang<sup>16</sup> waited in vain for the divine cargoes, so villagers in North Biak trudged

---

<sup>8</sup> Karl G. Heider, 1970, *The Dugum Dani: A Papuan culture in the highlands of West New Guinea*, (Chicago: Aldine Publishing Co.)

<sup>9</sup> Tom Beanal, 1997, *Amungme: Magaboaat Negel Jombe-Peibei*, (Jakarta: Walhi) hal.57-62.

<sup>10</sup> John G. Strelan dan Jan Godschalk, 1989, *Kargoisme di Melanesia*, (Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya) hal. 17-21.

<sup>11</sup> Muridan S. Widjojo, 1997, *Orang Kamoro dan Perubahan Lingkungan Sosial Budaya di Timika*, Irian Jaya, (Jakarta: LIPI) hal. 22-25.

<sup>12</sup> J.W. Schoorl, 1997, *Kebudayaan dan Perubahan Suku Muyu dalam Arus Modernisasi di Irian Jaya*, (Jakarta: Gramedia dan KITLV) hal. 440-444.

<sup>13</sup> Lihat Muridan S. Widjojo, “Puisi Pengharapan Bintang Kejora”, dalam *Tempo*, 22 Oktober 2000, hal.37.

<sup>14</sup> Freerk Ch. Kamma menulis, “The most curious aspect of these movements is the fact that, inspite of repeated disappointments, the people never gave up hope. For them it was always ‘not yet’, and the next *konoor*, sometimes the very same person, could once more be assured of a following.” Lihat Kamma, 1972, *Koreri: Messianic Movements in the Biak-Numfor Culture Area*, (The Hague: Martinus Nijhoff) hal 103.

<sup>15</sup> Nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) diciptakan oleh para penegak hukum Indonesia ketika memproses peradilan Terianus Aronggear pada 1964 yang memimpin kelompok Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat. Sejak itu nama OPM dipakai oleh kelompok-kelompok yang kegiatannya menentang pemerintah RI. Lihat John R.G. Djopari, 1993, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Grasindo) hal. 100-101.

<sup>16</sup> Madang adalah suatu daerah pantai di Papua Nugini. Brian May mengambil contoh kasus cargo cult di daerah Madang untuk menunjukkan karakteristik gerakan keagamaan di Papua Nugini yang sangat mirip dengan yang terjadi di Papua Barat atau Irian Jaya.

to hilltops overlooking the sea, where, they believed, a United Nations submarine would bring them food and guns.<sup>17</sup>

Kutipan tulisan Brian May yang meneliti di Papua pada sekitar akhir 60-an dan awal 70-an menunjukkan kompleksitas sekaligus karakteristik yang khas dari gerakan rakyat Melanesia. Ia tak dapat disebut semata-mata sebagai suatu gerakan politik atau gerakan perlawanan gerilya. Ia mengidap sesuatu yang secara psikologis jauh lebih kompleks daripada apa yang bisa didefinisikan sebagai suatu gerakan politik. OPM adalah suatu gerakan rakyat yang bersifat keagamaan yang isinya dijiwai oleh suatu ideologi keselamatan, pembebasan, dan pemakmuran melalui proses-proses yang bersifat gaib yang model-modelnya terdapat dalam mitos-mitos.

OPM lahir setelah serangkaian pertarungan kekuasaan yang melibatkan Pemerintah RI, Amerika Serikat, UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), Pemerintah Belanda, dan sejumlah elit terdidik Papua yang berlangsung sejak 1962 hingga 1969. Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera atau Act of Free Choice) pada 1969 menandai “kemenangan” usaha integrasi Papua Barat oleh Pemerintah RI. Sebagian elit Papua yang Pro Belanda hijrah ke Belanda. OPM adalah juga ditumbuhkan dan dibesarkan oleh seluruh proses tersebut di atas yang di dalamnya tersimpan pengalaman ketakadilan oleh rekayasa berlebihan dari militer Indonesia. Sebagian elit Papua pimpinan OPM membangun perlawanan. Sejak itu para elit Papua ini mencoba melibatkan rakyat dalam usahanya “merebut kembali” kemerdekaan Papua Barat yang sempat mereka proklamasikan pada 1 Desember 1961.<sup>18</sup>

Pada tahun-tahun 1971-1976 adalah masa peningkatan hubungan antara elit pendiri OPM dengan rakyat Papua di pedesaan. Alih-alih menghancurkan OPM, represi militer Indonesia justru meningkatkan semangat resistansi terutama di kalangan rakyat pedesaan. Banyak penduduk desa kemudian bergabung dengan OPM. Area yang mereka kuasai pada umumnya adalah hutan-hutan di sekitar perbatasan Irian Jaya-Papua Nugini karena bergerak di kota-kota sangat tidak mungkin. Pada 1976 terjadi perpecahan di antara dua komandan militernya: antara Seth Rumkorem dan Jacob Prai. Faksi Prai menamakan dirinya “Pemka” atau Pemulihan Keadilan dan membangun pasukan yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM. “Pimpinan” yang dalam pengasingan di mancanegara yakni Senegal dan Belanda tampaknya lebih mendukung Pemka. Sedangkan kelompok Rumkorem adalah faksi Victoria.<sup>19</sup>

Pada 1977-1978 OPM melancarkan perang gerilya dengan target para petugas pemerintah dan pendatang. Perang pecah terutama di wilayah suku Dani dan Damal, termasuk Amungme, di sekitar Pegunungan Tengah Kabupaten Jayawijaya. Kronologi Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih menunjukkan pertempuran sporadis di Jayawijaya sejak April 1977 hingga Agustus 1977.<sup>20</sup> Ratusan hingga ribuan orang Pegunungan Tengah Papua mendukung perang gerilya OPM. Mereka menyerang polisi, tentara, petugas pemerintah, dan pendatang. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Perang kemudian berakhir sementara dengan ditandai oleh kembalinya berbagai kelompok masyarakat ke desa masing-masing dan menyerah kepada Pemerintah RI.<sup>21</sup> Akibat dari gejolak politik ini, menurut Osborne, sekitar 3.000 orang Papua mengungsi ke Papua Nugini melalui jalur Pegunungan Tengah.<sup>22</sup>

Dari para Amungme yang pernah bergabung dengan pengungsi terungkap keyakinan di antara para pengungsi bahwa di Papua Nugini mereka akan memperoleh bantuan makanan dan persenjataan dari PBB dan dari Pemerintah Papua Nugini. Dengan bantuan persenjataan mereka berharap dapat melakukan serangan balik terhadap militer Indonesia yang sudah menguasai tanah Papua. Di pengungsian mereka ternyata tidak pernah mendapatkan bantuan senjata.

<sup>17</sup> Lihat Brian May, *The Indonesian tragedy*, hal. 183.

<sup>18</sup> Robin Osborne, 1986, “OPM and the quest for West Papuan unity”, dalam R.J. May (ed.) *Between two nations*, Australia: Robert Brown and Associates, hal. 51-53.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 54-56.

<sup>20</sup> Lihat juga Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, hal. 121-122.

<sup>21</sup> Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, 1988, “Military report of incidents in the District of Jayawijaya in 1977” dalam *West Papua: the obliteration of a people*, (UK: Tapol) hal. 119-124.

<sup>22</sup> Robin Osborne, “OPM and the quest for West Papuan unity”, hal. 57.

Mereka hanya mendapatkan bantuan makanan dari PBB melalui UNHCR. Penantian para pengungsi terhadap bantuan persenjataan itu berlangsung cukup lama hingga pada 1992 sebagian dari pengungsi kemudian dipulangkan dengan sukarela ke kampung halamannya masing-masing di Papua Barat.

Pada awal 1984 intelijen Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM akan melakukan serangan besar-besaran. Pada saat itu orang Papua gelisah akibat program transmigrasi yang dilaksanakan secara intensif di perbatasan Papua Barat-Papua Nugini. Pada saat yang sama militer Indonesia juga melakukan penangkapan sekitar 30 orang yang dicurigai sebagai anggota OPM. Salah satu korbannya yang terkenal adalah seorang kurator museum etnologi Universitas Cenderawasih Arnold Ap yang mencoba membangun identitas kepulauan melalui kesenian. Ia bersama tiga temannya diyakini telah dibunuh oleh pasukan Kopassus.<sup>23</sup> Pada saat itu dua faksi OPM aktif melakukan serangan-serangan terbatas di Biak, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. Salah satu aksinya yang diliput media secara luas adalah pengibaran bendera di halaman kantor Gubernur.

OPM sebagai suatu gerakan anti Indonesia yang sudah berumur sekitar 30 tahun belum mengalami kemajuan yang berarti sebagai suatu gerakan politik. Keberhasilan perjuangan dipahami sebagai penantian akan sang penyelamat atau sang Mesias yang dalam konteks OPM disandarkan pada apa yang disebut oleh Brian May sebagai sang Arbiter of Justice, the Omnipotent Power of Powers, the United Nations. Secara praktis ideologi yang mendominasi para pejuangnya adalah ideologi tradisional *cargo cult*. Organisasi dan kepemimpinannya tidak mengalami perkembangan yang berarti. Polarisasi faksi-faksi di dalamnya, faksi Prai dan faksi Rumkorem, membuat energinya terpecah dan tidak sinergis. Hanya dalam tekanan tertentu faksionalitas itu dapat menjadi cair sejenak untuk bersatu menghadapi ancaman militer Indonesia.

Sebagai suatu gerakan bersenjata OPM juga tidak berkembang. Upaya penyelundupan senjata tidak atau belum mampu dilakukan untuk memperkuat misalnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Meskipun penguasaan medan gerilya seperti hutan-hutan Pegunungan Tengah lebih unggul daripada TNI, kemampuan tempurnya melawan TNI, akibat minimnya persenjataan, juga masih sangat terbatas. Selain itu belum terlihat upaya untuk mengirimkan pada kader mudanya untuk berlatih perang gerilya di luar negeri untuk memperkuat kemampuan strategi dan komando peperangan.

Strategi penggalangan rakyat di pedesaan untuk bergabung dengan OPM pada awal 1970-an hingga sekarang juga tidak berkembang. Melalui temuan peneliti Universitas Cenderawasih S.A. Patty<sup>24</sup> terungkap bahwa OPM dalam menggerakkan perlawanan rakyat hanya menggunakan apa yang disebut Patty sebagai “janji-janji muluk” kepada rakyat pedesaan. Hasil wawancara saya dengan beberapa Amungme yang pernah aktif di dalam OPM menunjukkan bahwa motivasi perjuangan mereka di dalam OPM digerakkan oleh aspirasi yang bersumber dari *cargo cult*. Brian May, dengan menyitir antropolog Belanda F.C. Kamma, juga melihat gerakan OPM sebagai gerakan *cargo cult*.<sup>25</sup> Ini menunjukkan bahwa salah satu strategi pimpinan OPM adalah memanfaatkan aspirasi-aspirasi kemakmuran dan keselamatan dalam mitos-mitos kargoisme untuk menarik hati rakyat.

Kelemahan dari strategi kargoistik adalah sifat mistik dan gaib dari proses kemerdekaan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Meskipun efektif untuk menarik minat rakyat di pedesaan, pendekatan ini hanya menjadi afirmasi bagi mitos-mitos orang Papua tentang jaman milenial baru. Rakyat tidak didorong untuk memperoleh pemahaman baru untuk menerima suatu perjuangan politik yang lebih programatik dan pencapaian politik secara bertahap dalam perjuangan jangka panjang. Akibatnya dapat dipastikan dengan mudah. Para pengikutnya pasti akan kecewa dalam kurun waktu tertentu karena harapannya tidak kunjung tercapai. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa orang Papua hari ini menjadi aktivis OPM lalu karena hal tertentu pada hari berikutnya kembali ke kota dan ikut program pemerintah. Hal sebaliknya juga

---

<sup>23</sup> Ibid., hal. 59.

<sup>24</sup> S.A. Patty, “Penduduk Dani Barat dan Pembangunan”, dalam E.K.M. Masinambow dan Paul Haenen (eds.), 1994, *Kebudayaan dan Pembangunan di Irian Jaya*, (Jakarta: LIPI-RUL) hal. 127.

<sup>25</sup> Brian May, *The Indonesian tragedy*, hal. 182.

“dengan mudah” terjadi. Ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan kebebasan politik yang relatif lebih besar, OPM tidak lagi memimpin. Kepemimpinan itu justru diambil alih oleh elit-elit Papua di perkotaan terutama Jayapura dalam bentuknya sebagai Presidium Dewan Papua (PDP).

### 1.3 Diaspora Pro-Demokrasi

Amanelan jamai-a amanelan jamo	Mau beritahukan, mau perlihatkan
Wemjagamea negtewengamtayo amanelan jamo	Mau perlihatkan daerah yang dirusak oleh tentara
Bom tangan pangamtayo amanelan jamo	Mau perlihatkan tempat tentara lempar bom tangan
Senjata kaki dua pangamtayo amanelan jamo	Mau perlihatkan tempat tentara tembak kami dengan senjata kaki dua
Jongkok ingamtayo enago-a amanelan jamo	Mau perlihatkan tempat kami jongkok
Kacao ingamtayo enago-a amanelan jamo	Mau perlihatkan tempat kami terpencah
Tiarap ingamtayo enago-a amanelan jamo	Mau perlihatkan tempat kami tempat kami tiarap
Model baru-et mogamte enago-a amanelan jamo	Mau perlihatkan tempat kami kami dikejar dengan senjata model baru
Nai domatertayo enago-a amanelan jamo	Mau perlihatkan rumah saya dibakar oleh tentara
Nannak nannai amanelanjammo	Kakak-kakak, kami mau perlihatkan
Nemeak nemeai amanelanjammo	Saudara-saudara, kami mau perlihatkan

Lirik lagu di atas ditemukan pada 1997 oleh dua aktivis Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA)<sup>26</sup> di kalangan Amungme di Bella dan Alama yang menghadapi kekerasan militer sejak 1970-an. Temuan lagu ini, di antara sejumlah lagu yang lain, menunjukkan bahwa kekerasan dialami orang Amungme (salah satu di Pegunungan Tengah Papua) telah berlangsung sejak lama hingga tercipta lagu spontan tentang penderitaan mereka menghadapi TNI. Lagu-lagu ini dinyanyikan di kalangan Amungme di kala mereka berkebun, istirahat di kampung, atau berada dalam persembunyian. Lagu-lagu ini sekaligus mewartakan kepada anak-anak dan warga Amungme tentang kekejaman dan kekejian TNI.

Lagu tersebut di atas juga ditujukan pada aktivis-aktivis muda Amungme yang sejak 1994 bekerja keras membongkar pelanggaran HAM di kalangan rakyat Pegunungan Tengah Papua. Gerakan Pro-Demokrasi dan penegakan HAM ini berawal di Jayapura dan di Timika, pada akhir 1980-an, terutama di kalangan terdidik diperkotaan. Kalangan intelektual dan LSM Papua mendapatkan inspirasi perlawanan baru dari kondisi obyektif yang mereka alami dan interaksi dengan kelompok aktivis Pro-Demokrasi yang mengibarkan isu HAM, keadilan, dan lingkungan. Kerjasama intelektual lokal dengan LSM menghasilkan lembaga adat yang kemudian dilihat sebagai institusi yang representatif bagi rakyat Papua yang masih berbasis kesukuan.

LEMASA di Timika kemudian berperan menjadi lembaga masyarakat yang menggunakan strategi dan isu kelompok Pro-Demokrasi untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan perlawanannya terhadap militer. Secara mendasar tumbuhnya lembaga adat dan keterlibatannya dengan gerakan Pro-Demokrasi adalah lompatan budaya yang luar biasa pada sisi paradigma dan strategi. Dalam setiap unjuk rasanya simbol-simbol Papua Merdeka digantikan dengan simbol kemanusiaan dan keadilan melalui HAM dan lingkungan hidup. Pernyataan politik dan negosiasi menggantikan penyanderaan dan kekerasan yang biasa dilakukan oleh prajurit OPM. Sosialisasi dari mulut ke mulut dilengkapi dengan pelatihan, selebaran, dan konferensi pers. Ketertutupan kesukuan menjadi kerjasama antarsuku dan antarkelompok. Jaringannya meluas melampaui batas suku, agama, daerah, dan negara.

Dengan tumbuhnya kelompok Pro-Demokrasi di Jayapura dan di Timika yang mengembangkan jaringan dengan berbagai LSM lokal, nasional, maupun internasional perlawanan terhadap dominasi militer menjadi semakin efektif. Wacana tentang HAM, lingkungan, dan gender berkembang luas di kalangan intelektual Papua di perkotaan dan kegiatannya menyebar hingga ke pedalaman tertentu. Dengan dukungan penuh tetapi diam-diam dari Gereja Katolik, aliansi dari berbagai lapisan masyarakat ini mampu memberikan tekanan dan kontrol yang signifikan pada praktek politik dan ekonomi birokrasi yang secara ekonomis

<sup>26</sup> Lihat LEMASA, 1998, Bella dan Alama Berdarah, Timika: Laporan Investigasi HAM tak terbit.

eksploitatif dan secara politik represif. Prestasi semacam ini mencapai masa kejayaannya hanya hingga 1998.

Pada pihak aparatus negara, terutama militer, kenyataan tersebut di atas merupakan ancaman nyata terhadap situasi dan kondisi obyektif yang memberikan privilese pada militer. Mereka merespons secara cepat kecenderungan yang mengancam kelangsungan jaringan dan praktik politik dan ekonomi militer. Sementara itu pada pihak gerakan Pro-Demokrasi belum terbangun gerakan yang mengakar dan meluas, terbatas di Jayapura dan di sekitar Timika. Oleh sebab itu ketika elemen masyarakat Papua lain mengangkat isu kemerdekaan dan menyelenggarakan pengibaran bendera Papua, kelompok Pro-Demokrasi tidak mampu mengantisipasi tenggelamnya isu-isu demokrasi dan HAM. Bahkan sebagian aktivis Pro-Demokrasi juga menenggelamkan diri dalam trance gerakan keagamaan Papua Merdeka. Dukungan rakyat yang luas dan emosional pada aspirasi kemerdekaan menekan kelompok Papua mana pun yang mencoba merasionalisasi aspirasi tersebut. Bahkan yang bersangkutan akan dituduh sebagai pendukung gagasan otonomi.

Pada tataran wacana kalangan intelektual Pro-Demokrasi pun tersingkir. Kenyataan itu terlihat jelas menjelang Dialog Nasional 1999. Ketika Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (Foreri) didirikan perdebatan antara pilihan Otonomi (O), Federasi (F), dan Merdeka (M), pada awalnya masih terbuka. Namun setelah Dialog Nasional 1999 dan kelompok M yang dimotori oleh beberapa elit dari Tim 100 delegasi Papua dalam Dialog Nasional antara wakil rakyat Papua dengan Presiden RI B.J. Habibie menjadi dominan. Otokritik dari sesama Papua terhadap euforia M selalu dicurigai. Setiap upaya itu lalu diberikan stigma "otonomi." Sebagian kelompok Pro-Demokrasi kemudian mencoba menyesuaikan diri dan mencoba mendukung aspirasi "M." Sebagian lainnya mencoba diam dan menjaga jarak. Dengan ini maka dominasi faksi di dalam masyarakat yang mendukung M menjadi sangat dominan. Simbol huruf "F" yang sebelumnya berarti "Federasi" tenggelam dengan sendirinya. Orang dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah membuat dikotomi "O" dan "M."

#### **1.4. Presidium Dewan Papua**

PDP dan OPM memiliki tujuan yang sama. Bedanya terletak pada strategi yang dibangun. Jika OPM menggunakan perlawanan bersenjata, PDP menuntut kemerdekaan Papua dengan cara damai. Strategi ini diambil pertama karena cara OPM dianggap tidak efektif. Kedua karena PDP lahir dari suatu situasi politik transisional pada saat mana ruang politik dan kebebasan berpendapat relatif lebih terbuka dibandingkan pada era OPM. PDP lebih banyak mengandalkan pernyataan-pernyataan politik untuk menggugat keabsahan proses integrasi Irian Jaya atau Papua Barat menjadi bagian dari NKRI. Oleh karena itu wacana politik yang dikedepankan adalah "meluruskan sejarah integrasi Papua". Dengan ini kalangan pemimpinnya berharap pihak internasional, terutama PBB, akan meninjau kembali status politik Papua Barat.

Potensi dan peluang kepemimpinan Papua sebenarnya dimiliki oleh Presidium Dewan Papua yang terbentuk pada Kongres Papua 2000. Dengan dukungan besar dari delegasi-delegasi masing-masing kabupaten, PDP dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Papua menuju kemerdekaan. Hanya saja aspirasi seragam dan kuat dari rakyat Papua untuk merdeka tidak segera diolah oleh PDP menjadi energi politik yang mampu mentransformasi aspirasi mistik ini menjadi suatu gerakan politik. PDP tidak mampu mengolah momentum dan kepercayaan yang diberikannya menjadi suatu organisasi politik dan jaringan antar kelompok etnik yang berakar dan kuat. PDP ternyata kemudian tampil tanpa strategi dan program politik yang jelas. Selama keberadaannya langkah-langkah politik yang diambil sangat reaktif.

Komposisi pimpinan PDP sendiri sebenarnya kurang solid karena terdiri dari sejumlah orang yang sebagiannya sangat dekat dan terkait dengan Orde Baru dan Golongan Karya (Golkar). Ketua PDP, misalnya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) I Irian Jaya selama 2 periode dari Golkar. Pemimpinnya ditengarai memiliki hubungan erat dengan pimpinan preman dan organisasi pemuda yang memiliki jaringan kerjasama dengan keluarga mantan Presiden Soeharto. Seorang di antaranya diyakini berhubungan erat dengan pimpinan lembaga intelijen TNI. Selain itu seorang pemimpin yang lain telah menjadi komisaris

Freeport dan cenderung beralih pada kegiatan bisnis atau menjadi broker pada proyek-proyek besar Freeport.

Ketidakmampuan PDP juga berhubungan dengan *mission impossible* yang dibebankan pada PDP. Aspirasi Papua Merdeka sebagai suatu misi yang hampir tidak mungkin dilaksanakan atau dicapai karena *imagined* Free Papua bukanlah suatu keadaan yang dibayangkan hendak dibangun dan diperjuangkan melalui proses politik yang panjang dan berliku melainkan suatu keadaan yang referensinya berdasarkan mitos yang dimiliki oleh masing-masing kelompok etnik Papua. Cita-cita itu tidak dibayangkan dicapai dengan kerja-kerja politik yang panjang tetapi cita-cita itu dibayangkan datang dengan sendirinya dalam sekejap secara gaib melalui campur tangan nenek moyang mereka. Watak gerakan semacam ini dalam disiplin teologi lazimnya disebut *cargo cult*.

Jika pun PDP memulai suatu pengorganisasian dan program-program politik yang terencana dan visioner, institusi ini akan mendapatkan tekanan besar dari rakyat Papua dan bahkan ditentang karena yang dibayangkan oleh rakyat sama sekali bukanlah perjuangan melalui proses panjang dan kerja keras oleh rakyat Papua sendiri melainkan suatu keadaan makmur, sejahtera, dan damai yang diperoleh secara magis. Secara ajaib, seperti yang dikatakan dalam mitos-mitos! Stamina penantian rakyat pada kedatangan jaman baru tidaklah panjang. Rakyat akan dengan mudah kehilangan kesabaran. Sejumlah tekanan balik ke PDP sangat mungkin terjadi. Kemungkinan terbesar rakyat Papua akan menjadi jenuh dan mulai kembali kepada realitas kehidupan sehari-hari. Ini dalam waktu yang sama juga berarti kepercayaan rakyat pada PDP akan luntur dengan sendirinya.

### 1.5 Pendatang: Maju Kena Mundur Kena

Istilah “pendatang” di Papua mengacu pada berbagai kelompok orang non-Papua yang seringkali digambarkan sebagai si “rambut lurus” atau si “kulit terang”. Paralel dengan dominasi isu “M,” teror dan intimidasi terhadap pendatang meningkat. Sejumlah pemerasan dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Papua yang juga tak dapat terkontrol sepenuhnya oleh Presidium Dewan Papua. Potensi konflik horisontal menganga terbuka. Beberapa kali terjadi kekerasan antara keduanya terutama antara orang Papua asli dengan kelompok pendatang yang disebut BBM (Bugis, Buton, Makassar). Selain belum berkembangnya pemikiran PDP tentang posisi pendatang, kalangan pendatang pun tidak memiliki lembaga representasi yang memadai.

KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) oleh orang Papua lebih dipandang sebagai lembaga korporatif yang dekat dengan militer dan pemerintah.<sup>27</sup> Selain KKSS, belum ditemukan asosiasi pendatang yang berupaya meningkatkan posisi tawar dan kualitas representasinya di hadapan militer, pemerintah, maupun penduduk asli. Hingga 2001 belum terlihat upaya rekonsiliasi dan negosiasi antara kelompok pribumi Papua dengan pendatang. Sebagian besar pendatang dicekam ketakutan, ketakpastian masa depan, dan terbatasnya pilihan-pilihan. Pendatang pun sebagian berpikir untuk dan sebagian lainnya sudah meninggalkan tanah Papua. Tetapi mereka yang merasa terdesak dan harus mempertahankan diri mencoba mempersenjatai diri dengan senjata rakitan yang lebih efektif untuk membunuh dibandingkan dengan senjata orang Papua semacam parang, tombak, atau panah. Reaksi ini justru meningkatkan lingkaran kekerasan di Papua. Ketegangan hubungan pendatang-pribumi berada pada titik terburuk. Pembantaian pendatang oleh orang Dani pada Oktober 2000 di Wamena merupakan penegasan atas ketegangan itu.

Pendatang pada umumnya secara politik lebih dinilai berpihak pada penguasa. Dalam setiap krisis politik yang menghadapkan pemerintah versus penduduk asli, posisi pendatang ditempatkan berseberangan dengan penduduk asli. Pada Kerusuhan 1996 di Abepura isu utamanya adalah pengiriman jenazah Thomas Wanggai dan kemarahan orang Papua pada aparat

---

<sup>27</sup> Secara berimbang pada 1986 Aditjondro menguraikan dampak negatif dan positif dari kehadiran migran asal Sulawesi di Papua (waktu itu disebut Irian Jaya). Lihat George Y. Aditjondro, “Suatu Telaah Dampak Migrasi Suku-suku Bangsa dari Sulawesi Selatan dan Tenggara ke Irian Jaya” Laporan Seminar Pengembangan SDM di Irian Jaya (Jakarta: LRKN LIPI) hal. 26-47.

keamanan namun pendatang di Abepura, Waena, dan Sentani menjadi sasaran kekerasan. Pada sisi ini dapat dikatakan pendatang menjadi korban. Tindakan KKSS membuat demo tandingan mengancam dan menantang orang Papua di Sorong dan Manokwari pada 1998 adalah contoh lain dari keberpihakan pendatang pada militer. Pada sisi ini dapat dilihat tindakan pendatang yang memupuk kebencian orang Papua terhadap pendatang.

Posisi tersulit dihadapi oleh para transmigran yang tersebar di berbagai lokasi di Papua, terutama yang ditempatkan di perbatasan. Lahan-lahan yang disediakan oleh Departemen Transmigrasi untuk mereka mulai banyak dipersoalkan oleh penduduk setempat. Ini membuat para transmigran tidak dapat lagi melanjutkan hidupnya dengan tenang karena setiap saat akan ada gangguan. Keadaan itu juga diperburuk dengan penanganan dan perhatian pemerintah terhadap para transmigran yang terbatas. Ketika hasil-hasil pertanian tak dapat lagi menopang kehidupan ekonomi mereka maka para transmigran itu juga harus mendatangi kota-kota terdekat untuk mencari penghasilan baru.

Keadaan menjadi lebih buruk bagi transmigran karena mereka menjadi korban di dalam pertarungan OPM melawan militer Indonesia. Transmigran di Arso, Jayapura, adalah contoh di mana transmigran menjadi bulan-bulanan di tengah konflik dan pertarungan politik. Kasus transmigran Satuan Pemukiman (SP) 7 dan SP 8 Bonggo Jayapura yang meninggalkan lokasi karena teror dan mengungsi ke LBH Jayapura menjadi puncak gunung es dari problem transmigrasi di Papua. Sejak Januari 1999 hingga pertengahan 2001 mereka terlantar, tidak mendapat perhatian. Akibatnya selama mengungsi sudah 22 orang meninggal karena berbagai penyakit.<sup>28</sup> Bagi OPM transmigran merupakan target yang paling mudah untuk melakukan tekanan terhadap Pemerintah RI dan militer. Bagi militer, transmigran yang terancam dapat menjadi dalih yang efektif untuk membangun citra Papua sebagai wilayah yang rawan dan tidak stabil dari segi keamanan.

## **1.6. Birokrasi Sipil: Mesin yang Lumpuh**

Pada era Orde Baru birokrasi sipil baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten adalah sepenuhnya representasi pemerintah pusat. “Pembangunan” sebagai kegiatan utama pemerintah daerah dirancang dan dilaksanakan oleh para aparatnya dengan tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan kontradiksi kultural yang mungkin terjadi. Praktek pembangunan yang dilakukan pada akhirnya menjadi bagian dari persoalan-persoalan baru dan bukan menjadi bagian penyelesaian masalah rakyat Papua. Dalam perspektif budaya, praktik pembangunan lebih menghasilkan deprivasi kultural dan keterasingan rakyat Papua daripada emansipasi sosial.

Birokrasi sipil dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam lebih merupakan pelayan pengusaha besar dan mengabdikan pada kepentingan dirinya sendiri dan pejabat-pejabatnya. Tanah-tanah hak ulayat diambil alih secara sewenang-wenang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas nama pembangunan. Pada 1980-an pengkaplingan hutan-hutan Papua dilakukan oleh pengusaha, kroni-kroni, dan penguasa Jakarta. Ketika terjadi resistansi dari masyarakat, pemerintah segera menggunakan tangan-tangan militer dan stigma OPM untuk merepresi protes dan perlawanan masyarakat.

Selama Orde Baru pula korupsi, kolusi, dan nepotisme berurat akar di dalam birokrasi pemerintah daerah. Di dalam praktiknya setiap pejabat menggunakan kekuasaannya untuk korupsi dan memberikan fasilitas pada kerabat atau kenalan yang berasal dari kelompok etnik yang sama. Pada satu sisi hal ini membuat orang Papua melihat persoalan birokrasi sebagai bagian dari diskriminasi oleh kelompok-kelompok etnik pendatang (Jawa, Manado, Batak, Bugis, Buton, Makasar) terhadap kelompok-kelompok etnik Papua. Pada sisi lain kemakmuran pada pejabat birokralnya melahirkan kecemburuan di pihak aparat birokrasi yang putra Papua.

Transmigrasi sebagai kebijakan Pemerintah RI dipandang sebagai upaya yang bersifat “kolonialistik” untuk membuat orang Papua menjadi minoritas di tanahnya sendiri. “Jawanisasi” adalah stigma umum yang berkembang baik di kalangan intelektual Papua maupun birokrat

---

<sup>28</sup> “Jenazah Koprak diusung ke DPRD Papua,” Kompas, 22 Juli 2000.

Papua tentang transmigrasi.<sup>29</sup> Sikap anti transmigrasi ini semakin berkembang sejalan dengan berbagai wacana tentang peminggiran orang Papua pada satu sisi dan dominasi pendatang pada sisi lain. Selain itu proses implementasi program transmigrasi, terutama proses pembebasan lahan, dipandang penuh manipulasi dan intimidasi terhadap penduduk setempat. Oleh sebab itu pada Februari 2000 Wagub R.G. Djopari mengusulkan agar transmigrasi ditunda dan diutamakan program pemberdayaan orang Papua.<sup>30</sup>

Kecurigaan terhadap “politik jawanisasi” yang tersembunyi di balik transmigrasi makin berkembang ketika intelektual Papua membaca program Keluarga Berencana (KB) yang digalakkan selama masa Orde Baru. Di kalangan intelektual pegunungan tengah KB dipandang sebagai upaya untuk membuat orang Papua punah. Menurut mereka secara alami pertumbuhan penduduk Papua asli sangat lambat dan akan lebih lambat lagi jika diintervensi oleh program KB yang membatasi tingkat kelahiran. Semua ini dibaca sebagai suatu desain besar diskriminatif Pemerintah RI yang hendak membuat pendatang Jawa menjadi dominan dan orang Papua akan semakin terpinggirkan dan bahkan bisa punah.

Pada saat reformasi bergulir dan isu Papua Merdeka menguat, kalangan birokrasi justru tidak mampu memberikan kontribusi pemetaan masalah dan resolusi alternatif kepada pemerintah pusat untuk memberikan perspektif lokal yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya pejabat-pejabat birokrasi lokal ikut mereproduksi stigma-stigma OPM, separatisme, dan makar. Pada satu sisi tuntutan merdeka menjadi ancaman tersendiri bagi aparat yang pendatang namun pada sisi lain aparat yang putra Papua mendapatkan peluang yang besar untuk memanfaatkan isu Papua Merdeka.

Pemerintah terutama pemerintah daerah di Papua kehilangan sebagian besar wibawa dan otoritasnya. Dari kasus tahun 2000 dapat diambil beberapa contoh. Pada 7 Februari massa rakyat meneygel 10 kantor pemerintah kabupaten Sorong dan menuntut bupatinya mundur. Sembilan hari kemudian di Merauke massa rakyat mengamuk merusak kantor RRI dan kantor Bupati yang waktu itu sedang kampanye otonomi khusus. Pada 19 Maret Bupati Fakfak dan ajudannya dikeroyok oleh massa. Pada Mei, ketika Wakil Presiden Megawati berkunjung ke Papua, terjadi perusakan rumah dan mobil dinas Bupati Jayawijaya. Di Biak mobil Ketua DPRD II disandera oleh massa.<sup>31</sup>

Inheren dalam wacana Papua Merdeka adalah adanya dominasi pendatang atas orang Papua di dalam berbagai bidang termasuk sektor birokrasi. Kesempatan ini digunakan oleh para birokrat putra Papua untuk menghembuskan isu “papuanisasi” dan tujuan praktisnya adalah merebut posisi-posisi pimpinan birokrasi pada level propinsi dan kabupaten. Pada kurun 1999-2001 praktis terjadi papuanisasi jabatan-jabatan penting semacam gubernur hingga kecamatan dan kepala desa.<sup>32</sup> Dalam situasi semacam itu rasionalitas penjenjangan karir berdasarkan golongan, pendidikan, dan kemampuan tidak lagi berlaku. Rasionalitas birokrasi yang pada era Orde Baru hanya sebatas ucapan kini semakin parah karena didominasi dengan isu primordial.

Di dalam wacana tuntutan Papuanisasi selalu dikemukakan bahwa dengan duduknya putra Papua sebagai pimpinan pemerintahan daerah seakan-akan “dipastikan” adanya komitmen

---

<sup>29</sup> Sikap anti transmigrasi tidak hanya melanda kalangan intelektual Papua, tetapi juga kalangan birokrat dan anggota DPRD I Irian Jaya yang orang Papua asli. Peristiwa terkatung-katungnya warga eks transmigran Bonggo SP 7 Jayapura yang mengungsi di LBH Jayapura adalah contoh konkrit. Sejak mengungsi Pemda Irian Jaya terkesan tidak peduli bahkan setelah 22 orang di antaranya meninggal karena berbagai penyakit seperti malaria, TBC, infeksi saluran pernafasan, dan stres. Lihat “Jenazah Koprak Diusung ke DPRD Papua,” *Kompas Online*, 21/7/2000.

<sup>30</sup> “Tunda, Transmigrasi ke Papua,” *Kompas*, 11 Februari 2000. Diskusi tentang transmigrasi sudah pernah ditulis dengan kritis oleh George Aditjondro, 1986, “Transmigration in Irian Jaya: Issues, Targets, and Alternative Approaches.” Amsterdam 28-29 April 1986. Makalah tak terbit. Di dalam makalahnya Aditjondro mencoba menepis 4 isu populer yang berkembang di Papua, Nugini, Australia, dan Belanda, yakni: ‘Jawanisasi’, ‘Islamisasi’, ‘Militerisasi’ dan pengambilalihan tanah secara tidak adil. Ia mengatakan bahwa tuduhan itu tidak relevan lagi ketika berdasarkan Keppres 1986 transmigrasi tidak lagi dari Jawa tetapi juga Bali, Timor, Flores, Sumba, dan lain-lain. Juga dari segi agama kebanyakan transmigran non-Jawa adalah Kristen. Lihat hal. 5-6.

<sup>31</sup> “Kronik Politik Papua 2000,” Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 2001.

<sup>32</sup> Bandingkan “Papuanisasi Segera Dimulai di Papua,” *Kompas*, 22 Juni 2000. Secara verbal, sebagaimana diutarakan oleh Wagub R.G. Djopari, papuanisasi adalah perluasan kesempatan dan peningkatan kesejahteraan orang Papua di dalam konteks otonomi daerah. Meskipun R.G. Djopari mengatakan bahwa papuanisasi berbeda dengan jawanisasi namun dalam praktiknya kedua terminologi itu mengacu pada praktik politik yang kurang lebih sama.

dan strategi baru pembangunan yang lebih mengutamakan warga Papua secara keseluruhan. Pada praktiknya kedudukan baru yang dinikmati oleh aparat putra Papua sebagian besar disalahgunakan. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dilakukan secara terbuka. Korupsi dan kolusi tidak lagi dilakukan secara tersembunyi seperti sebelumnya. Di satu kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua seorang bupati menghabiskan sebagian besar anggaran pemerintah kabupaten untuk perjalanan-perjalanannya ke Jayapura dan ke Jakarta bersama rombongan staf yang direkrutnya dari kerabat-kerabatnya.

Disiplin birokrat pada masa Orde Baru sangat rendah. Pada era reformasi disiplin kerja semakin menurun. Kantor-kantor Pemda Tingkat I misalnya lebih banyak terlihat kosong. Pada awal 2000, Kompas melaporkan absensi yang tinggi di kalangan pejabatnya. Mulai dari Gubernur, para kepala kantor wilayah, dan kepala dinas sangat sering meninggalkan kantor dan lebih banyak melakukan perjalanan ke Jakarta. Tugas-tugas pelayanan publik pun semakin terbelengket. Warga yang berkepentingan pun akhirnya tidak terlayani. Padahal warga-warga tersebut tidak hanya datang dari sekitar Jayapura tetapi juga dari kabupaten lain dengan ongkos transport pesawat yang mahal.<sup>33</sup> Hal ini juga terjadi di pedalaman. Di Kecamatan Akimuga, misalnya, pada awal 2001, saya menemukan kantor kecamatan yang kosong. Menurut guru setempat sang camat sudah berbulan-bulan berada di Timika. Dana pembangunan kecamatan digunakan untuk membiayai hidupnya dan berfoya-foya di Timika.

Papuanisasi merupakan salah satu fenomena yang menegaskan lumpuhnya birokrasi di Papua. Fungsi-fungsi kepemimpinan, pengelolaan konflik, pelayanan masyarakat, dan *governance* secara umum tidak berjalan. Kelumpuhan birokrasi ini membuat pemerintah semakin tidak mampu mengatasi krisis integrasi nasional dalam hubungannya dengan penolakan terhadap apa pun yang diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan tumbuhnya etnonasionalisme di Papua. Birokrasi sipil di daerah belum dapat diharapkan menjadi aktor potensial untuk resolusi dari kemelut hubungan Indonesia-Papua. Sebaliknya ia merupakan bagian dari soal besar yang dihadapi oleh Republik Indonesia jika integrasi nasional ingin dipertahankan.

### **1.7. Militer: Mempertahankan Dominasi**

Pada era Orde Baru, sejak 1970-an, operasi militer di Papua semakin intensif karena selalu dikaitkan dengan upaya pemberantasan gerakan OPM. Selama 31 tahun belum ada indikasi bahwa operasi militer yang dilakukan mampu menyurutkan gerakan OPM tersebut. Terdapat banyak kemungkinan dari kegagalan semacam ini. Pada beberapa kasus dapat dikatakan bahwa pasukan OPM adalah kelompok perlawanan yang memiliki daya survival yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasukan TNI karena hutan lebih dikuasai. Pada kasus lain sebaliknya terlihat bahwa sebenarnya TNI memiliki kemampuan untuk mengakhiri gerakan perlawanan OPM namun TNI sendiri berpentingan dengan adanya operasi tersebut yang secara militer, politik, dan ekonomi sangat menguntungkan.

Alih-alih memberantas OPM, telah berakar dan tumbuh meluas kepentingan politik dan ekonomi militer di Papua. Keberadaan OPM justru menjadi penjamin bagi kelangsungan operasi militer dan keterlibatan militer di dalam birokrasi sipil dan dunia usaha. Ketidakamanan menjadi alat tawar militer yang efektif untuk mempertahankan perannya dan memperluas dominasinya. Di dalam birokrasi sipil institusi militer memiliki kekuatan untuk mengambil alih posisi-posisi kepemimpinan dan birokrasi sipil dengan isu keamanan dan stabilitas. Di dalam lingkungan dunia usaha peran militer dibutuhkan untuk memberikan jaminan keamanan terhadap kelangsungan dunia usaha.

---

<sup>33</sup> Lihat "Ketika Papua Ditinggalkan Pimpinan," *Kompas*, 31 Januari 2000. Di dalam laporan ini dikutip pula pendapat Saul J Bonay, bekas komandan OPM, yang juga bekas narapidana di LP Kalisosok bahwa kinerja kerja pemerintah sekarang mendorong tuntutan merdeka semakin kuat. Pengibaran bendera bintang kejora pun semakin gencar dilakukan secara sporadis di mana-mana. Kehadiran pemerintah di Papua hanya untuk mengejar kepentingan pribadi dan keluarga. Tidak ada upaya membangun kesejahteraan rakyat. Jika ada, ujung-ujungnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

OPM juga digunakan sebagai stigma terhadap masyarakat, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap masyarakat Jawa. Masyarakat Papua dibayang-bayangi dengan stigma ini setiap kali mereka berkonflik dengan kelompok yang disokong oleh atau menjadi bagian dari negara, baik itu dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah, maupun dengan pihak militer sendiri. Stigma ini berfungsi untuk merepresi sekaligus teror untuk membunuh keinginan melakukan kritik maupun resistansi yang tumbuh di kalangan masyarakat. Namun pada saat yang sama militer sebenarnya juga mengajarkan pada masyarakat bahwa OPM adalah musuh militer dan oleh karena itu dapat menjadi alternatif simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Papua.

Atas nama OPM pula militer melakukan represi fisik. Setiap kali ada aksi penyanderaan oleh kelompok OPM, setiap kali itu pula dilakukan operasi militer besar-besaran di wilayah yang dianggap sebagai wilayah OPM. Harga yang harus dibayar dengan pola semacam ini adalah berbagai macam pelanggaran HAM dari yang paling ringan hingga yang paling biadab terhadap masyarakat sipil. Militer, bagi kebanyakan rakyat Papua, telah menjadi simbol representasi Indonesia sebagai rejim pembunuh rakyat. Oleh sebab itu ketika gerakan Pro-Demokrasi mulai tumbuh dan melakukan kampanye HAM sejak 1994 hingga 1998 di Papua, rakyat Papua memberikan dukungan “moral” yang sangat besar. Isu HAM menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan tekanan politik dan delegitimasi terhadap keberadaan militer.

Militer sungguh-sungguh merasa terancam dengan perkembangan gerakan HAM di Papua karena pada saat yang sama secara nasional dwifungsi juga sedang digugat dan mengalami delegitimasi. Secara internasional dukungan terhadap perlindungan HAM sangat kuat. Oleh karena itu terjadi perubahan strategi di dalam militer dalam rangka mempertahankan dominasinya di Papua. Sejak 1998, ketika gerakan HAM memuncak dan era reformasi dimulai, militer tidak lagi menggunakan tangannya sendiri untuk mempertahankan diri dan kepentingannya. Mereka menggunakan kelompok-kelompok penduduk asli yang direkrut dan dididik baik sebagai anggota resmi maupun sebagai intel pembantu. OPM dan separatisme sebagai isu kunci tidak berubah dan ternyata masih efektif.

Ketika gerakan HAM dan antimiliter memuncak pada Juni 1998, kurang dari satu bulan kemudian, atau pada awal Juli 1998, marak aksi pengibaran bendera di berbagai kabupaten. Pengibaran ini bermunculan pada kurun 1998-1999, dan 2000. Jika diamati dengan seksama berdasarkan isu yang beredar, kronik peristiwa, dan sebagian tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya menunjukkan keterkaitannya dengan kesatuan-kesatuan yang ada di dalam militer. Pengalihan dari isu HAM ke isu M (Merdeka) ini ternyata masih efektif. Respon rakyat Papua terhadap isu M sangat cepat. Dalam tempo kurang dari 6 bulan, hampir di separuh dari jumlah kabupaten yang ada di dalam Propinsi Irian Jaya terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora. Pancingan kibaran bendera dan memoria passionis rakyat Papua yang tercampakkan selama 30 tahun menjadikannya sangat efektif.

Dengan maraknya pengibaran bendera dan tuntutan kemerdekaan, pada awal 1999, militer dapat dikatakan berhasil mempertahankan keberadaan pasukan nonorganiknya di Papua. Pada 6 Januari 1999 Panglima Daerah Militer (Pangdam) Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring menyatakan bahwa belum saatnya penarikan pasukan yang berasal dari luar Papua karena masih diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Lima hari kemudian Kapendam Trikora Letkol (Inf.) Herry Risdiyanto menegaskan kembali bahwa Kodam Trikora tidak akan mengurangi pasukan nonorganiknya. Bahkan Aster Kasdam Kolonel (Art.) Wais Ningkeula mengecam wakil rakyat dan pengamat yang hanya bisa menghujat TNI tetapi tidak pernah terjun ke pedalaman.<sup>34</sup>

Untuk menandingi berbagai kelompok atau komite pendukung “M” pada Februari-Maret 2000 dibentuk kelompok milisi Satgas Merah Putih dan kemudian menyusul pembentukan Satgas Pemuda Pembela Negara bentukan militer. Pada Agustus 2000 Satgas Merah Putih di Jayapura melakukan unjuk kekuatan dan menantang Satgas Papua untuk tampil.

---

<sup>34</sup> Pernyataan ini merupakan reaksi terhadap kritik Drs. Very Pioh bahwa ABRI tidak konsekuen dengan pernyataannya semula untuk menarik pasukan nonorganiknya. Lihat Theo van den Broek ofm dan J. Budi Hernawan, ofm., “Bagian I: Kronik 1999” dalam *Memoria Passionis di Papua*, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Jakarta, 2001, hal. 4.

Bentrok pertama Satgas Merah Putih dengan pemuda Papua pendukung “M” terjadi di Fakfak pada 22 Maret 2000. Sejumlah pendukung Papua Merdeka ditahan namun pihak Satgas Merah Putih dibebaskan. Bentrok berikutnya terjadi antara Satgas Papua dengan polisi di Jayapura yang menimbulkan korban jiwa.<sup>35</sup>

Namun aksi pengibaran bendera dan tuntutan merdeka ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama karena pada akhir 2000 stamina rakyat Papua mulai menurun (?). Sebagian rakyat dan elitnya kembali kepada kehidupan sehari-hari. Untuk periode tertentu Papua tenteram dengan angka kekerasan relatif kecil. Lalu muncul berbagai kekerasan baik terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil yang menurut militer dimulai oleh OPM. Dengan ini militer dan polisi mempunyai alasan untuk melakukan operasi pembalasan maupun penangkapan. Arah dari skenario semacam ini adalah pertama penegasan kepada publik bahwa tanah Papua tidak aman dan terancam separatisme. Kedua, bahwa OPM terbukti telah melakukan kekerasan dan itu berarti bahwa OPM masih sangat berbahaya. Maka sejak 2000 di Papua terciptalah suatu lingkaran kekerasan baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun kelompok masyarakat sendiri.

Sejak Abdurrahman Wahid berkuasa polisi diberi ruang gerak yang lebih luas. Di Papua ini berarti bahwa sebagian besar dari wilayah dan kegiatan yang selama ini dikuasai oleh TNI Angkatan Darat (AD) diambilalih oleh polisi yang dalam hal ini adalah Brigade Mobil (Brimob). Di tingkat lapangan perubahan ini menimbulkan konflik terselubung antara pasukan Brimob dengan pasukan TNI AD. Perkelahian terbuka yang terjadi seperti pada kurun 1996-1997 tidak lagi terjadi setelah 1998, tetapi muncul lagi pada 2000 di Timika dan 2001 di Serui. Konflik mereka tampak ketika ada kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau kasus pembunuhan yang diberi interpretasi politik. Pada sisi lain terdapat upaya untuk membuat masyarakat antipati terhadap polisi.

Dalam hal kepentingan terhadap ketidakamanan terdapat kerjasama individu antarperwira polisi dan militer. Suasana kekerasan dirawat dengan bersikap pasif pada bentrokan fisik yang ditemui secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Kritik terhadap sikap ini dijawab dengan “apologi HAM.” Alasan ini bukan sesungguhnya karena pada kasus lain aparat keamanan terlihat emosional dan brutal. Di sini aparat keamanan menjalankan kewajibannya secara diskriminatif dan personal. Jika kekerasan dialami oleh kelompok masyarakat yang bermasalah dengan aparat maka tidak akan ada penanganan. Sebaliknya aparat akan terlihat tegas dan cepat jika korbannya adalah kelompok yang mempunyai hubungan baik dengan atau memberikan keuntungan pada aparat.

Kekerasan tentu identik dengan ketidakamanan dan itu berarti bahwa institusi bersenjata yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan memiliki daya tawar yang tinggi dengan institusi-institusi sipil yang semakin rapuh. Dengan demikian pada satu sisi kelompok sipil tidak berdaya menghadapi gejolak sosial dan akibatnya membuka diri lagi bagi intervensi institusi keamanan. Tujuan praktis dari polisi adalah diperolehnya imbalan politik dan ekonomi. Dan pada sisi lain kehadiran pasukan nonorganik TNI tetap mendapat pembenaran. Hingga 2001 dengan suasana yang rawan kekerasan polisi dan militer menjadi semakin eksis dan memaksakan kembali legitimasinya, meskipun hanya dari pihak pusat.

## **1.8. Gereja Katolik dan Protestan: Pemihakan**

Pada masa Orde Baru Gereja Katolik adalah lembaga agama yang paling aktif mendukung gerakan Pro-Demokrasi. Oleh karena itu hubungannya dengan militer cukup tegang. LSM terkemuka Papua semacam Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) dan LBH Jayapura berdiri dengan dukungan Gereja Katolik. Keterlibatan Gereja Katolik pada penegakan HAM misalnya sebenarnya sudah ditunjukkan oleh para petugasnya yang aktif di berbagai tempat di Papua. Namun keterlibatan para pastor itu lebih bersifat individual. Pastor Nato Gobay, Pr. yang menjadi salah satu pendukung aktif kampanye HAM 1995, 1996, dan

---

<sup>35</sup> ELS-HAM Papua, “Menyimak Peta Potensi Konflik di Papua Barat,” Analisis intern tak terbit, Jayapura, tanpa tanggal, hal. 6.

1997 adalah pastor paroki Mimika-Akimuga. Tom Beanal dan Yopie Kilangin yang aktif di dalam LEMASA adalah juga seorang pastor (awam). Secara diam-diam dapat dikatakan bahwa Gereja mendukung gerakan Pro-Demokrasi yang mengagendakan penegakan HAM dan demokratisasi.

Secara institusional formal Gereja Katolik sangat berhati-hati di dalam menjaga garis demarkasi antara kegiatan agama dan politik. Pada akhir Desember 1994 ketika permintaan aktivis LSM terhadap Gereja Katolik, dalam hal ini Keuskupan Jayapura, agar menjadi penanggungjawab laporan pelanggaran HAM yang dibuat oleh aktivis LEMASA, persetujuan diberikan dengan persyaratan yang ketat. Keuskupan dipilih karena lembaga ini dinilai cukup berwibawa dan terpercaya untuk menyampaikan pelanggaran HAM. Keuskupan pun kemudian mencoba mendorong agar laporan benar-benar akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya, laporan pelanggaran HAM 1995 oleh Keuskupan Jayapura kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menjadi pukulan politik yang sangat telak bagi militer Indonesia.

Berbeda dengan Gereja Katolik, Gereja-gereja Kristen Protestan pada masa Orde Baru sebagian besar lebih memilih apolitis, bersikap moderat secara politik, atau menjadi bagian dari Orde Baru. Hanya beberapa intelektualnya yang bergerak di bidang pendidikan yang bersikap kritis secara akademis. Di tingkat akar rumput peran para pendeta dalam pembelaan hak-hak rakyat di pedalaman-pedalaman hampir tidak ditemui. Baru pada awal 1998, Ketua Klasis Gereja Kingmi Timika dan Ketua GKI Timika ikut menandatangani laporan HAM Bella dan Alama. Banyak sebab bisa dirunut. Pertama, jaringan dan kekuatan organisasinya tidak sekuat Katolik. Kedua, tingkat pendidikan para pastor jauh lebih tinggi daripada para pendeta umumnya. Rata-rata pendidikan pastor adalah sarjana S1 plus, sedangkan para pendeta seringkali terbatas pada sekolah alkitab, dan bahkan sebagian darinya tidak mengenyam pendidikan umum. Ketiga, wawasan pendeta terbatas acuannya pada teks agama sedangkan para pastor memperoleh pendidikan analisis atas teks dan konteks sosial di samping agama.

Ketika gelombang reformasi tiba dan rakyat Papua terbuai oleh aspirasi kemerdekaan, Gereja Katolik di Papua justru tidak melibatkan diri secara langsung. Sebaliknya banyak pendeta melibatkan diri secara langsung dan bahkan menjadi pemimpin di berbagai lapisan, mulai di tingkat PDP hingga Panel Papua di kabupaten. Para pendeta terlibat lebih banyak dari para pastor, selain wawasan dan pendidikan, terutama karena mereka biasanya bertugas di kampung halamannya sendiri dan mobilitas sosialnya sangat terbatas dan dengan demikian perspektif sosial dan politiknya juga terbatas. Akibat dari itu juga beberapa pendeta secara tidak sadar dimanfaatkan oleh kalangan militer untuk mendorong sejumlah isu yang sudah dirancang oleh militer.

Berangkat dari kenyataan ini maka dapat dimengerti jika secara politis militer lebih memperhitungkan kekuatan Gereja Katolik. Konflik antara militer dengan Gereja Katolik pun terlihat di permukaan pada saat petinggi militer Kodam Trikora menuduh Keuskupan Jayapura sebagai "GPK." Perang pernyataan pun sempat terjadi di antara dua institusi ini. Komitmen Keuskupan Jayapura terhadap HAM dan keadilan semakin eksplisit ketika Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan semakin aktif dan secara mandiri membuat berbagai investigasi HAM, penulisan laporan, dan penerbitan sebagaimana layaknya sebuah LSM yang bergerak di bidang HAM dan demokratisasi.

### **1.9. Dunia Usaha: Dominasi Freeport**

Freeport adalah ikon dari suatu kolaborasi kekuatan kapitalisme, rejim otoritarian militeristik, dan birokrasi kleptomaniak dalam mengeruk kekayaan sumber daya alam di Papua. Ia juga ikon dari pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Sebaliknya ia juga ikon dari pengharapan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan orang Papua. Siapa pun dapat berbicara tentang apa saja di Papua dan dengan mudah mengaitkannya dengan Freeport. Freeport adalah juga kasus yang layak dipersoalkan ketika kita mencoba membaca hubungan antara dunia usaha dengan masyarakat adat Papua.

Pada 1967 Freeport adalah investor asing pertama yang menanamkan modal di Papua dan juga di Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru. Untuk kegiatan pertambangannya Freeport

menggunakan lahan suku Amungme. Protes pertama dari Amungme muncul sejak 1967. Sejumlah Amungme menanam patok kayu berbentuk salib di sekeliling peralatan dan kemah tim eksplorasi Freeport. Dengan bantuan pemimpin Amungme Moses Kilangin yang waktu itu Kepala Pos Pemerintahan di Akimuga konflik dapat diredam. Diyakinkan oleh Moses bahwa Freeport hanya mentes batu-batuan dan hasilnya akan pasti menguntungkan Amungme. Sesuai pengeboran, ketika tim pergi, semua peralatan dirusak dan barang-barang dicuri oleh penduduk setempat.<sup>36</sup>

Protes dan keberatan Amungme terhadap Freeport kian mengeras pada 1973. Freeport dan pemerintah segera membuat perjanjian dengan Amungme dari Tsinga dan Waa di dalam January Agreement 1974. Untuk Freeport, perjanjian ini penting sebagai bukti ijin tertulis untuk kegiatan pertambangan dari Amungme (pasal 5) dan larangan bagi Amungme untuk memasuki lokasi-lokasi kegiatan pertambangan dan tempat tinggal karyawan (pasal 6 dan lampiran 4).<sup>37</sup> Dengan demikian Freeport mendapatkan jaminan tertulis bahwa tidak akan ada lagi gangguan dari Amungme.

Menurut teks perjanjian pada Pasal 3 dan lampiran 4, Amungme Waa dan Tsinga akan mendapatkan bangunan sekolah dasar untuk siswa-siswa hingga kelas 3 dan selanjutnya dikembangkan hingga kelas 6. Selain itu Amungme akan mendapatkan perumahan, klinik, pusat perbelanjaan, dan prioritas kesempatan bekerja di Freeport. Isi perjanjian ini tidak sepenuhnya dapat dipenuhi. Sebagian bangunan yang dijanjikan sempat dibangun di Waa dan kemudian di Kwamki Lama, Timika tetapi kemudian dihancurkan lagi oleh pasukan TNI menyusul perlawanan bersenjata OPM pada 1977. Sebagian Amungme memang kemudian diterima menjadi karyawan Freeport tetapi karena pendidikan dan ketrampilan yang rendah, mereka menjadi karyawan rendahan. Keadaan ini justru mempertajam kontradiksi.

Pada gejala sosial 1977 OPM melancarkan aksinya dengan menyerang pegawai pemerintah, anggota TNI, dan pendatang. Salah satu tindakan Amungme, bersamaan dengan gejala itu, untuk melawan Freeport adalah pemotongan pipa konsentrat (*slurry pipe*) dan sejumlah serangan fisik ke Tembapapura. TNI segera menghentikan gangguan ini dengan operasi militer yang salah satunya adalah menghancurkan fasilitas-fasilitas umum untuk masyarakat setempat yang sudah dibangun oleh Freeport di Waa dan di Kwamki Lama. Setelah masalah OPM mereda, pemerintah melalui TNI melarang Freeport untuk membangun kembali fasilitas tersebut di Waa.

Pasca Gejolak Sosial 1977 keadaan relatif tenang di areal pertambangan Freeport. Namun ketegangan hubungan antara Masyarakat Amungme dengan Freeport masih terasa dan bahkan semakin menguat di bawah permukaan. Tidak ada satu kerusuhan pun yang mencuat ke permukaan. Pada 1983 kembali ketegangan mencuat ketika tersebar isu bahwa kota Tembapapura akan dihancurkan oleh OPM dengan bantuan orang-orang Amungme yang sudah bekerja pada Freeport. Penangkapan terhadap pegawai Amungme dilakukan, sejumlah orang yang ketakutan melarikan diri ke hutan.

Lahan Amungme, untuk berkebun, untuk membuat kampung, dan untuk berburu, semakin sempit. Freeport sudah menambang dan membongkar gunung-gunung dan mengambilalih sebagian lahan tradisional mereka yang begitu luas. Yelsegel Ongopsegel atau Ertzberg sudah ditambang sejak 1967 dan mulai memproduksi sejak 1972. Amungme menyaksikan gunung keramatnya yang dulunya dipercaya sebagai tempat bersemayam terakhir bagi para roh pada sekitar 1996 sudah menjadi rata dan bahkan menjadi lobang raksasa.

Sejak 1990-an Grasberg mulai ditambang bahkan skala produksi dan kerusakan pada lingkungan alam Amungme menjadi dua kali lipat. Kebutuhan tempat tinggal bagi pekerja tambang dan kegiatan penunjang tambang lainnya juga menyita banyak lahan Amungme. Kota Tembapapura, Hidden Valley, Kuala Kencana, dan pembangunan instalasi Freeport lainnya sejalan dengan perkembangan perusahaan semakin menyita lahan Amungme (dan juga

---

<sup>36</sup> George Mealey, 1996, *Grasberg*, Freeport-McMoran Copper and Gold Inc., New Orleans, hal. 91-94. Lihat juga 'Moses Kilangin, Pembawa Damai di Timika' dalam *Kompas*, 25 Agustus 1991, hal 14. Nama 'Moses' merupakan pemberian misionaris, nama aslinya adalah Kal Malan.

<sup>37</sup> "Result achieved by Freeport Inc.'s settlement team with the local people on 5-11 January 1974 at Tembapapura," Dokumen January Agreement 1974 disertai lampiran.

Kamoro). Yang lebih merusak lagi adalah pasir sisa tambang yang dialirkan ke sungai-sungai yang selama ini menjadi sumber hidup dan secara kultural menjadi sumber identitas Amungme. Keberatan dan protes atas kerusakan lingkungan alam sudah disampaikan Amungme kepada Freeport tetapi belum ada dialog dan pemecahan yang diterima bersama. Langkah-langkah sepihak Freeport dan Pemerintah sudah dilakukan untuk mengurangi arus protes itu, namun persoalan dasarnya belum pernah dibicarakan atau dipecahkan secara terbuka.

Pada 1991 Freeport mulai mengembangkan program-program sosialnya yang sejak 1995 dikelola dalam Sustainable Development Department. Pada tahun-tahun itulah dikembangkan berbagai kegiatan dengan payung Community Development untuk pengembangan masyarakat, Business Incubator untuk pengembangan pengusaha kecil, Malaria Control untuk pengendalian penyakit malaria, Freeport Irian Jaya Foundation untuk kegiatan derma dan sumbangan pendidikan. Selain itu dimulai juga secara lebih intensif pelatihan bagi tenaga kerja lokal agar lebih trampil dan siap bekerja dalam bidang industri.<sup>38</sup> Sejak kerusuhan Maret 1996, secara struktural terjadi perombakan dalam organisasi. Semua program sosial Freeport di bawah kendali Community Affairs Department yang dipimpin oleh seorang Vice President putra Papua asal Biak.

Sebaliknya pada tahun-tahun 1990-an itu Freeport juga memanen berbagai persoalan yang terpendam sejak 1967. Komitmen Freeport dalam mengembangkan masyarakat setempat dipertanyakan karena sebelum 1990 tidak terdapat program-program sosial yang secara signifikan membantu pengembangan masyarakat setempat. Masalah rekognisi tanah ulayat Amungme dan Kamoro, kesenjangan sosial ekonomi, rekrutmen tenaga lokal di dalam Freeport, dan kesediaan dialog Freeport dengan penduduk setempat, merupakan soal yang banyak mengemuka. Pada 1994-1995 terungkap serentetan pelanggaran HAM oleh aparat TNI AD yang sebelumnya hanya rumor di kalangan penduduk pegunungan. Freeport dituduh oleh banyak pihak terlibat dalam tindakan tersebut. Salah satu akibat internasionalnya, OPIC, perusahaan asuransi yang menanggung risiko politik, sempat membatalkan komitmennya.

Kelahiran LEMASA membuka babak baru hubungan Freeport dengan Amungme. Freeport, sejak 1995, sejak terungkapnya pelanggaran HAM, berusaha memecahkan masalahnya dengan Amungme. Usaha itu kian intensif ketika Pemimpin LEMASA Tom Beanal dan Yosepha Alomang berusaha menggugatnya ke pengadilan New Orleans di Amerika Serikat. Aliansi LEMASA, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), bersama dengan sejumlah pengacara Indonesia dan Amerika membuat Freeport harus mencari jalan yang lebih efektif. Pada satu sisi upaya perdamaian dengan Tom Beanal dilakukan dan pada sisi lain Freeport juga mengundang Tim Audit Sosial untuk membantu memecahkan masalah hubungannya dengan Amungme.

Di tengah proses itu kerusuhan Maret 1996 pecah di Timika. Pemberian dana satu persen dari pendapatan Freeport untuk penduduk lokal yang sudah dirancang sebelumnya pun segera diluncurkan. Sementara proses pengadilan terus berlangsung, dana satu persen digulirkan. Sebagian besar energi LEMASA tersedot ke dalam antisipasi dampak satu persen pada perjuangannya melawan Freeport. Sebagian penduduk lokal dari tujuh suku mendukung dana satu persen dan sebagian lainnya mendukung LEMASA yang menolak dana itu. Berbagai konflik pecah pada 1997 karena kekacauan penanganan dana satu persen oleh kelompok pro satu persen yang dimotori oleh sejumlah oknum militer dan penduduk setempat yang berafiliasi dengannya.

Proses negosiasi LEMASA dengan Freeport mulai berjalan dengan bantuan mediasi dari Komisi Nasional (Komnas) HAM yang waktu itu diwakili oleh Marzuki Darusman dan sejumlah aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 1998. Negosiasi-negosiasi belum sempat menghasilkan kesepakatan yang mendasar karena prosesnya yang alot. Nampaknya Freeport kemudian mengambil jalan lain dengan mendekati secara personal elit LEMASA dan menawarkan sejumlah bisnis untuk mereka. Pendekatan ini berhasil dengan dua

---

<sup>38</sup> Lihat Labat-Anderson Inc. (1996), Draft of Technical Results Social Audit of PT Freeport Indonesia, Jakarta. Labat-Anderson Inc. (1997), Final Social Audit FT Freeport Indonesia, Jakarta. Lihat juga August Kafiari dkk. (1997?), Peranan PT Freeport Indonesia Company dalam Pembangunan Masyarakat dan Daerah Irian Jaya, Makalah Tak Terbit.

dampak sekaligus. Pertama sejumlah elit LEMASA mulai jinak terhadap Freeport dan kedua, dengan dorongan Freeport, mereka melancarkan sejumlah tuduhan kepada WALHI dan aktivis LSM yang selama ini membantu mereka. Dengan demikian hubungan LEMASA dengan kalangan LSM menjadi buruk.

Perkembangan berikutnya semakin menguntungkan Freeport ketika proses pengadilan tidak dilanjutkan oleh Tom Beanal dan dengan berbagai alasan Tom menerima tawaran Freeport untuk menjadi komisaris Freeport. Pada tahap ini Freeport mendapatkan keuntungan besar. Pertama, dana satu persen yang diluncurkannya—yang sejak awal 1999 dikelola oleh elit-elit Amungme—dan peluang bisnis baru yang ditawarkannya cukup membuat elit LEMASA teralihihkan perhatiannya dan membuat LEMASA sebagai institusi perwakilan Amungme menjadi tidak terurus. Kedua, lawan utama Freeport, yakni Tom Beanal bersama aliansi LSMnya, sudah dilemahkan. Tom sudah menjadi komisaris dan mau tidak mau ia harus membela Freeport. Sedangkan LSM pun tidak punya dasar untuk terlibat jauh pada masalah Amungme dan Freeport.

Memasuki tahun 2000, perkembangan politik semakin menguntungkan Freeport. Tom Beanal terlibat aktif dalam perjuangan menuntut kemerdekaan Papua melalui Tim 100, dan kemudian melalui Kongres Rakyat Papua ia memimpin PDP. Dari sini dapat dipastikan bahwa Tom tidak akan lagi mempunyai perhatian dan energi untuk memantau apa yang dilakukan oleh Freeport. Selain itu perjuangan di dalam PDP membutuhkan sejumlah dana yang sebagiannya bergantung dari Freeport. LEMASA yang sebelumnya menjadi pengawas utama kegiatan Freeport mengalami disorientasi. LEMASA sejak 2000 tinggal gedung sekretariat yang tanpa kegiatan berarti. Amungme yang dulu terkonsolidasi secara kuat karena LEMASA, karena Tom Beanal, karena elit terdidik Amungme lainnya, dan karena dukungan berbagai LSM, kini berjalan tanpa kepemimpinan yang berarti menghadapi lahan yang makin sempit, lingkungannya yang semakin rusak, tekanan arus pendatang, dan harapan tentang masa depan yang sementara ini digantungkan pada cita-cita Papua Merdeka.

## **2. Arah Politik di Papua**

Tumbuhnya diaspora gerakan Pro-Demokrasi di Papua yang dimotori oleh LSM dan lembaga adat di Papua sejak 1994 menandai tumbuhnya masyarakat dan kepemimpinan sipil lokal dalam melawan rejim fasis otoriter Orde Baru dan raksasa kapitalisme semacam Freeport. Namun pertumbuhan kekuatan masyarakat sipil ini tidak sempat berkembang ke arah pelebagaan politik yang memperkuat posisi masyarakat dan kepemimpinan sipil dalam berhadapan dengan aparatus negara yang mencoba mempertahankan privilese dan praktik politik yang menguntungkan di masa Orde Baru serta kekuatan pemilik modal terutama perusahaan multinasional semacam Freeport.

### **2.1. Dari Orde Baru ke Reformasi**

Orang Amungme di Kabupaten Mimika adalah salah satu kelompok etnik yang sejak 1967 sudah melakukan perlawanan terhadap dominasi Freeport dan sejak 1970-an terhadap TNI. Perlawanan, pertama, dilakukan dengan cara bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang beroperasi di Pegunungan Tengah Papua. Kedua, perlawanan individu maupun berkelompok dibangun dengan cara tradisional, cenderung tribalistik, dan sporadis. Kedua model perlawanan itu ternyata sebagian besarnya menghasilkan operasi dan alienasi terhadap Amungme. Selain kehilangan lahan dan menghadapi lingkungan yang hancur oleh Freeport, Amungme juga menjadi bulan-bulanan kekerasan sebagai wujud praktik operasi militer dan politik TNI.

Perlawanan Amungme ini mengalami transformasi sejak 1994 ketika Amungme mendirikan LEMASA. Amungme berhasil mempersatukan diri dengan pemimpin dan lembaga yang relatif solid. Jaringannya pun berkembang hingga ke Jayapura melalui terutama melalui YPMD, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Adat (LPPMA), dan Lembaga

Bantuan Hukum (LBH) Jayapura. Dengan Jakarta mereka mendapat dukungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), ELSAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan LPPS. Dengan LSM manca negara mereka berkoordinasi dengan ACFOA, Amnesti Internasional, dan LSM lain yang bergerak di bidang HAM dan lingkungan hidup. Tidak berhenti di sini, aktivis LEMASA juga terlibat di berbagai kerjasama pelatihan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mewakili gerakan masyarakat adat Indonesia.

Aktivis LEMASA, bekerjasama dengan LSM-LSM, dan dengan memanfaatkan otoritas Keuskupan Jayapura berhasil membongkar dan mengumumkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap Amungme sejak 1993 hingga 1994 pada Agustus 1995. Ini prestasi besar pertama LEMASA. Pada 1997 mereka melakukan investigasi HAM di Bella dan Alama di pedalaman Pegunungan Tengah Papua. Hasilnya memberikan tekanan politik yang luar biasa terhadap militer. Di tingkat internasional, beberapa kerjasama militer, misalnya antara Indonesia dengan Australia dan Amerika, dibatalkan akibat kampanye tentang pelanggaran HAM oleh TNI di berbagai daerah termasuk Papua.

Tumbuhnya kekuatan Amungme dan tindakannya saat itu dapat dikatakan menjadi satu arus dengan gelombang reformasi dan protes kelompok Pro-Demokrasi di Jakarta dan sebagian Indonesia yang menuntut pencabutan Dwifungsi TNI. Pada 22 April 1998 Kelompok Pro Reformasi Irian Jaya (KPRI) turun ke jalan Abepura untuk menuntut reformasi ekonomi dan politik. Aksi tersebut, pada 21 Mei 1998, dilanjutkan oleh gabungan mahasiswa Jayapura yang mencoba sejalan dengan arus gerakan protes mahasiswa di tingkat nasional menuntut “turunkan harga” dan percepat SI MPR.

Penajaman isu HAM dan serangan terhadap TNI semakin gencar tatkala pada 25 Mei 1998 perwakilan Tiga Gereja Mimika (Katolik, Kingmi, dan GKI) mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta untuk melaporkan secara resmi pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah Irian Jaya yang menimpa orang Amungme di daerah Bella dan Alama. Laporan itu sendiri merupakan hasil investigasi para aktivis Amungme yang tergabung di LEMASA. Sehari kemudian, FOSMII (Forum Solidaritas Mahasiswa se-Irja) mendesak Komnas HAM untuk merespon laporan Tiga Gereja. Untuk kampanye di Jakarta pada hari yang sama Satgas Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menghimbau Habibie yang waktu itu menjabat sebagai Presiden untuk mengakhiri semua operasi militer di Papua yang sudah menelan banyak nyawa dan menyebabkan kelaparan.

Di Jayapura, elemen LSM dan mahasiswa tidak tinggal diam. KP-HAM (Komite Peduli-HAM) bersama 200 rombongan mahasiswa mendatangi DPRD I meminta pertemuan dengan Gubernur Irian Jaya dan Pangdam VIII Trikora untuk mempersoalkan pelanggaran HAM.<sup>39</sup> Meskipun dalam aksi ini KP-HAM tidak berhasil menemui Gubernur dan Panglima, sehari kemudian pihak Kodam VIII menunjukkan reaksinya. Irdam VIII Kol. C.M. Panjaitan menjanjikan pembentukan Tim Pencari Fakta Kodam VIII.<sup>40</sup> Aksi kampanye HAM dan tekanan terhadap TNI terus ditingkatkan. Pada 2 Juni 1998 di DPRD I 20 orang wakil KP-HAM menagih janji Ketua DPRD I Sitorus untuk mempertemukan mereka dengan Gubernur dan Pangdam. Mereka berhasil menemui Pangdam dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).<sup>41</sup>

Gelombang protes kelompok Pro-Demokrasi di Jayapura mendapatkan respons di Biak. Pada 4 Juni 1998 kelompok Pemuda Gereja Biak menyatakan dukungan terhadap tuntutan yang terdapat dalam laporan Tiga Gereja Mimika. Oleh karena itu mereka menuntut penarikan TNI dari tanah Papua dan digantikan oleh aparat kepolisian. Isu protes sempat berkembang ketika LAHKI (Lembaga Advokasi Hukum dan Keadilan Irian Jaya) mendesak Presiden B.J. Habibie membebaskan sekitar 140 tapol dan napol asal Papua.<sup>42</sup>

Puncak gerakan protes kelompok Pro-Demokrasi dan HAM adalah pada 5 Juni 1998. Pada hari itu KP-HAM Irja dengan kekuatan massa 250 orang menduduki kantor DPRD I Irian Jaya selama 12 jam dari pukul 8.30 hingga 20.45 wit. Aksi ini baru berakhir setelah ada faksimili dari Komnas HAM mengenai kepastian jadwal investigasi. KP-HAM mengutuk keras

---

<sup>39</sup> *Cenderawasih Pos*, 30 Mei 1998.

<sup>40</sup> *Cenderawasih Pos*, 30 Mei 1998.

<sup>41</sup> *Cenderawasih Pos*, 3 Juni 1998.

<sup>42</sup> *Cenderawasih Pos*, 5 Juni 1998.

pelanggaran HAM di Pegunungan Tengah, menuntut kepastian akan datangnya tim Komnas HAM, dan menolak Tim Pencari Fakta (TPF) Kodam VIII Trikora. Aksi itu membuat Gubernur Freddy Numberi, Pangdam VIII Amir Sembiring, dan Ketua DPRD I Sitorus hadir. Di depan tiga pimpinan Irian Jaya ini KP-HAM menuntut pengadilan bagi pelaku pelanggaran HAM, penghapusan pendekatan keamanan, pencabutan kontrak karya Freeport, dan reformasi seluruh UU yang sama sekali tidak menjamin hak-hak masyarakat adat.<sup>43</sup> Pada hari itu juga Foker (Forum Kerjasama) LSM Irian Jaya mengeluarkan pernyataan pers menuntut reformasi total, otonomi daerah untuk Papua, penghapusan DOM, dan pencabutan paket 5 UU Politik.<sup>44</sup> Isu HAM di Papua sempat untuk beberapa lama menjadi dominan di Papua.

Serangan terhadap TNI melalui isu HAM, penghapusan daerah operasi militer (DOM) dan penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sangat efektif dalam menekan perilaku aparat TNI yang biasanya sewenang-wenang. Tindak kekerasan dan perilaku arogan aparat TNI di Timika misalnya menjadi berkurang drastis. "HAM" menjadi senjata setiap kali terjadi keributan antara seseorang warga sipil dengan oknum aparat TNI. Khusus terhadap Amungme, dengan pemimpin yang kuat dan organisasi LEMASA yang legitimate posisi tawar Amungme pun menjadi tinggi di hadapan Freeport. Tekanan melalui isu HAM, tuntutan hukum dengan tuduhan genosida di pengadilan Lusiana Amerika Serikat, dan penolakan dana satu persen, memberikan kapital simbolik yang kuat terhadap LEMASA baik di mata rakyat Papua maupun publik nasional.

Posisi kuat itu memuncak ketika, melalui mediasi Komnas HAM, Freeport bersedia bernegosiasi dengan Amungme atau LEMASA. Dalam pertemuan itu disepakati sejumlah rencana untuk memperbaiki hubungan Amungme dengan Freeport dan mekanisme pengelolaan dana pembangunan sebesar satu persen dari pendapatan Freeport. Pada saat itu Amungme merupakan satu-satunya kelompok suku yang berhasil dengan perjuangannya memiliki posisi tawar yang sangat kuat berhadapan dengan Freeport, TNI, dan pemerintah.

Tetapi pengakuan terhadap Amungme dan terhadap organisasi perwakilan LEMASA tidak dijaga dengan baik oleh para aktivis LEMASA sendiri. Para aktivis tidak siap dengan negosiasi lanjutan dengan Freeport. Beberapa pemimpinnya terjebak oleh berbagai tawaran proyek Freeport dan pada akhirnya LEMASA melemah beriringan dengan terserapnya energi pemimpin Amungme pada kepengurusan dana satu persen yang besarnya sekitar Rp 150 milyar per tahun, proyek-proyek Freeport yang bernilai ratusan juta hingga milyaran rupiah, dan keterlibatan pemimpin utamanya dalam eforia tuntutan Papua Merdeka.

Sejak Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya didirikan untuk mengelola dana satu persen Freeport sebagian besar energi aktivis Amungme terbaik tersedot ke dalamnya. Pada saat itu sebenarnya, LEMASA, sebagai pelopor gerakan Pro-Demokrasi di kalangan masyarakat adat Amungme khususnya dan di Papua pada umumnya menjadi lumpuh. Kelumpuhan itu menjadi sempurna tatkala Tom Beanal yang kemudian menjadi pimpinan utama Presidium Dewan Papua juga menjadi Komisaris Freeport. Dengan demikian setiap kali ada protes dan perlawanan dari Amungme dan LEMASA, Tom Beanal menjadi bumper yang sangat efektif. Warga sipil Amungme lalu kehilangan "jembatan" dan "juru bicara" yang dulunya dapat menjadi penghubung mereka dari dunia tribal kepada dunia kapitalis dan industrial.

## 2.2. Dari HAM ke arah Separatisme

Di tengah gegap gempita aksi massa dan kampanye menuntut penuntasan penyelesaian pelanggaran HAM oleh TNI, pencabutan DOM, dan penarikan pasukan non-organik TNI di Papua, tiba-tiba muncul dua macam selebaran yang memprovokasi konflik antaragama pada hari Senin 8 Juni dan Selasa 9 Juni 1998. Versi pertama yang ditujukan pada umat Islam menyatakan bahwa akan ada pembakaran masjid oleh kelompok Kristen. Versi kedua

---

<sup>43</sup> *Cenderawasih Pos*, 6 Juni 1998.

<sup>44</sup> *Cenderawasih Pos*, 6 Juni 1998.

menyatakan hal serupa akan terjadi pada gereja-gereja oleh kelompok Islam.<sup>45</sup> Dua selebaran ini relatif gagal kecuali menciptakan ketegangan di tengah-tengah masyarakat.

Sembilan hari kemudian terbetik berita bahwa 3 warga transmigran di Arso ditembak dan seorang di antaranya diculik oleh kelompok tak dikenal. Pihak TNI menuduh kelompok OPM sebagai pelakunya.<sup>46</sup> Tetapi opini di kalangan aktivis LSM dan masyarakat meragukan tuduhan itu dan sebaliknya mereka mencurigai TNI AD berada di balik peristiwa Arso. Motivasi di balik peristiwa menjadi agak jelas ketika pada hari yang sama Gubernur Freddy Numberi yang juga perwira tinggi TNI AL mengutuk OPM seraya mengatakan, “Walaupun kini sudah ada permintaan dari warga masyarakat sendiri yang menyatakan tidak memerlukan pengamanan dari ABRI karena merasa terganggu, tapi kalau sudah terjadi hal seperti itu maka tidak bisa ditolerir lagi.” Kepentingan TNI semakin jelas ketika Freddy Numberi menambahkan, “Karena itu keberadaan ABRI sebagai pelindung masyarakat masih sangat diperlukan.”<sup>47</sup>

Peristiwa Arso dan pernyataan Freddy Numberi merupakan petunjuk awal adanya reaksi resisten kalangan TNI untuk mempertahankan eksistensinya di Papua. Resistansi aparat negara dalam hal ini TNI, birokrasi sipil yang dipimpin oleh militer, dan kepolisian dalam bentuk pengalihan isu dari masalah HAM dan demokrasi kepada isu Papua Merdeka dan konflik horizontal semakin jelas. Enam hari setelah pernyataan Freddy Numberi tersebar di pasar-pasar di hampir semua kabupaten di Papua suatu surat berisi informasi khusus yang berstatus rahasia. Surat itu dikeluarkan oleh Direktorat Intelijen dan Pengamanan Polda Irian Jaya yang sebagiannya menyatakan bahwa pada 1 Juli akan diadakan aksi serentak oleh masyarakat Irian Jaya, khususnya putra daerah, untuk menuntut pemisahan diri dari Republik Indonesia dan pada kegiatan tersebut akan dilakukan penaikan bendera Bintang Kejora.

Tersebarnya surat rahasia Polda Irian Jaya itu mengundang pertanyaan. Mengapa surat itu dapat dengan mudah jatuh ke tengah-tengah masyarakat Papua? Yang jelas kemudian adalah bahwa surat itu menjadi “undangan” bagi warga sipil “putra daerah” Papua untuk mengobarkan kembali semangat menuntut kemerdekaan yang sejak lama terpendam. Pada akhir Juni 1998, sebagian kelompok mahasiswa Papua di Jayapura yang sebelumnya juga aktif di dalam KP-HAM terpancing untuk “menindaklanjuti” surat tersebut dengan merencanakan kemungkinan demo pro perjuangan kemerdekaan Papua. Di Kotaraja, Jayapura, sekitar 25 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa merencanakan pengibaran bendera pada 1 Juli 1998.<sup>48</sup>

Turning point politik itu menjadi nyata ketika pada 1 Juli 1998 kerumunan massa dari kecamatan Depapre, Genyem, Demta, Sentani, Abepura serta berbagai tempat sekitar Jayapura berkumpul di Taman Imbi dan di depan Gedung DPRD I di tengah kota. Beberapa orang meneriakkan tuntutan merdeka dan melambaikan bendera Bintang Kejora dengan tongkat kayu. Polisi dan Brimob segera mengepung lokasi. Sempat terjadi saling lempar batu. Massa bertahan hingga pukul satu dinihari sebelum kemudian dipaksa bubar oleh pasukan Brimob.<sup>49</sup> Tujuh jam kemudian kerumunan massa tetap bertahan di Jalan Irian. Brimob kembali mengusir massa dan massa membalasnya dengan pelemparan toko-toko di sekitarnya.

Aksi massa mendukung Papua Merdeka juga muncul di Sorong. Di bawah pimpinan Petrus Sewa dan Robyanus Kambuaya kelompok yang menamakan diri FRMMPB (Forum Reformasi Mahasiswa dan Masyarakat Papua Barat) mengerahkan tiga ribuan orang mendatangi kantor DPRD II Sorong, menuntut referendum bagi kemerdekaan Papua dan penghentian kekerasan terhadap warga sipil dan anggota OPM. Dialog sempat terjadi dengan unsur Muspida namun massa memaksa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Aparat keamanan mencoba menghalangi dan membubarkan massa. Bentrok tak terhindarkan. Kantor pemerintah, rumah dan toko pendatang dirusak. Sejumlah kendaraan bermotor dibakar. 41 orang ditahan.<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> *Cenderawasih Pos*, 10 Juni 1998.

<sup>46</sup> *Suara Pembaruan*, 18 Juni 1998 dan *Kompas*, 19 Juni 1998.

<sup>47</sup> *Cenderawasih Pos*, 19 Juni 1998.

<sup>48</sup> Hasil laporan investigasi Els-HAM Irian Jaya, 1998.

<sup>49</sup> Hasil laporan investigasi Els-HAM Irian Jaya, 1998.

<sup>50</sup> Hasil laporan investigasi Els-HAM Irian Jaya, 1998. Lihat juga *Bernas*, 3 Juli 1998.

Warga Biak yang secara historis menjadi pelopor gerakan Papua Merdeka tidak mau ketinggalan. Pada hari itu juga, 2 Juli 1998, di bawah pimpinan karyawan Pemda orang Biak Philipus Karma, pada pukul lima pagi, sekitar 75 orang mengibarkan bendera di menara air yang menghadap ke laut. Massa menari-nari Yospan dan mengundang massa lain hingga 1000-an orang. Ketua DPRD II Biak datang meminta bendera diturunkan namun ditolak. Bentrok terjadi antara massa dengan polisi. 13 aparat polisi menderita luka-luka. Bendera dapat dipertahankan. Keesokan harinya para kepala desa di Biak dikerahkan untuk membawa massa penduduknya untuk menyerbu massa pro Papua Merdeka di menara air tetapi masyarakat menolak.

Sementara di Biak massa mati-matian mempertahankan bendera, di Jayapura, di kampus Universitas Cenderawasih, 500 mahasiswa mengadakan aksi demo mengecam DPRD I yang tidak sudi menerima massa aksi pada demo 1 Juli 1998. Dalam aksi ini terjadi bentrok dengan aparat keamanan. Satu mahasiswa kemudian tewas, seorang anak kecil terkena peluru nyasar, dan seorang aparat terluka.<sup>51</sup> Sementara itu aksi massa di Sorong berlanjut lagi. Massa menagih janji Ketua DPRD II. Bentrok terjadi antara massa pro Papua Merdeka melawan kelompok pendatang Bugis dan Makassar. Polisi dan TNI turun tangan. Seorang demonstran tewas dan 21 orang menderita luka-luka.<sup>52</sup>

Pengibaran bendera di Biak memecahkan rekor terlama karena sanggup bertahan hingga 6 Juli 1998. Meskipun pihak Pemerintah Kecamatan dan Koramil setempat mengerahkan sejumlah kades untuk membawa massa menyerbu selalu gagal karena selalu ada perlawanan dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pihak massa pro Papua Merdeka yang berada di menara air yakin bahwa akan segera datang kapal PBB bersama Sekjen PBB Koffi Anan yang akan mengakui kemerdekaan mereka. Pada 6 Juli menjelang fajar pasukan gabungan polisi dan TNI melakukan serbuan dari 4 arah. Korban luka 29 orang dan tewas 1 orang.<sup>53</sup>

Penduduk Papua di Wamena pun menyusul dengan pengibaran bendera sehari setelah penyerbuan di Biak yaitu pada 7 Juli 1998. Di bawah pimpinan Jan Menai pengibaran bendera dilakukan di depan kantor DPRD II Jayawijaya. Massa berhasil dikumpulkan, menari, dan menyanyi untuk menuntut Papua Merdeka. Proses di sini agak lain. Bendera dapat dipertahankan hingga pukul sembilan malam setelah bernegosiasi dengan otoritas sipil dan militer. Yang menarik di sini pimpinan aksi Jan Menai dikenal dekat dengan TNI. Pada malam harinya dilaporkan Jan Menai minum-minum di rumah Dandim. Keesokan harinya ia dilaporkan mengambil uang di BPD Wamena dan minum-minum sampai mabuk.

Di tengah gelombang tuntutan rakyat Papua untuk kemerdekaan muncul berbagai pernyataan dan aksi tandingan oleh kelompok yang berafiliasi dengan rejim Orde Baru. Pada 3 Juli 1998 Ketua Gerakan Merah Putih Saul Yenu menyatakan bahwa sejak Pepera 1969 Irian Jaya sah menjadi bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>54</sup> Di Merauke tujuh Kepala Suku (Mapi, Mandobo, Muyu, Kimaan, Marind, dan Awuyu) mengutuk tuntutan reformasi yang tidak murni, menyusahkan masyarakat, dan memecah belah persatuan dan kesatuan Irian Jaya.<sup>55</sup> Pada 7 Juli 1998 Legiun Veteran Republik Indonesia di hadapan Dandim 1701 Jayapura mengutuk keras aksi kelompok separatis dan menyatakan siap untuk memanggul senjata kembali untuk menumpas aksi separatisme.<sup>56</sup> Di Jayapura pada 10 Juli Ketua Forum Komunikasi Intelektual Irian Jaya Hendrik Korwa menyatakan bahwa tuntutan kemerdekaan Papua adalah angan-angan yang tidak bakal terwujud dan hanya membuang waktu dan tenaga.<sup>57</sup>

Aksi tandingan yang memprihatinkan terjadi di Sorong pada 8 Juli 1998. Kelompok Pro Persatuan dan Kesatuan Bangsa KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) dengan dikawal oleh Pasukan Yonif 733 membuat aksi demo tandingan dengan membawa senjata clurit, badik, besi pipa, dan lain-lain. Mereka menyatakan, “Kutuk kaum perusak!”, “Sapu bersih pengacau NKRI”, “OPM pencuri dan perampok”, “Orang Ayamuru hitam berdaki, bau busuk!”

<sup>51</sup> Lihat *Suara Pembaruan*, 3 Juli 1998. *Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Kompas, The Jakarta Post*, 4 Juli 1998.

<sup>52</sup> *Cenderawasih Pos*, 4 Juli 1998. Lihat juga Hasil laporan investigasi Els-HAM Irian Jaya, 1998.

<sup>53</sup> Hasil laporan investigasi Els-HAM Irian Jaya, 1998.

<sup>54</sup> *Cenderawasih Pos*, 8 Juli 1998.

<sup>55</sup> *Cenderawasih Pos*, 7 Juli 1998.

<sup>56</sup> *Cenderawasih Pos*, 8 Juli 1998.

<sup>57</sup> *Cenderawasih Pos*, 11 Juli 1998.

“Turunkan Bupati, Bupati hitam dan berdaki”, “Kalau jago, keluar! Kita berkelahi”. Ini merupakan salah satu demo tandingan yang rawan dengan kekerasan dan memancing konflik horizontal yang dahsyat antara pendatang (Bugis-Makassar) melawan orang Papua.<sup>58</sup>

Perkembangan politik di Papua kemudian didominasi oleh kontestasi aksi massa dan perang pernyataan antara faksi pro Papua Merdeka yang didukung oleh sebagian besar rakyat Papua melawan elemen birokrasi sipil, TNI, kepolisian, pendatang, dan sebagian orang Papua yang berada di lingkaran organisasi korporatis Orde Baru. Pada 2 Oktober 1998 di Manokwari sekitar 20 orang di halaman DPRD II Manokwari menurunkan Merah Putih dan menggantinya dengan Bintang Kejora. Aparat Polres lalu turun tangan. Bentrok terjadi. Aksi ini empat hari kemudian ditandingi oleh kelompok pedagang Bugis-Makassar di Pasar Tingkat Sanggeng dengan aksi menuntut agar para perusuh diadili. Massa Bugis-Makassar tampaknya emosi. Mereka berteriak, “Kalau rasa diri bukan WNI pergi dari sini”. “Papua merdeka mau apa, Papua tukang pencuri tukang rampok”. Situasi menjadi tegang. Siang harinya di Pasar Wosi kelompok Suku Arfak asli Papua mengerahkan 100 orang untuk aksi mengecam orang-orang Papua asal Biak dan Serui yang dituduh mengacaukan keamanan Manokwari. Nampaknya aksi Papua Merdeka di Manokwari dimotori oleh orang-orang Papua asal Biak.

Sejak maraknya aksi ini rakyat Papua kembali mendapatkan keyakinan bahwa Papua Merdeka sudah “di ambang pintu”. Seluruh perhatian rakyat tercurahkan pada aspirasi kemerdekaan dan harapan bahwa “dunia baru” yang penuh keselamatan, kemakmuran dan pembebasan dari segala derita akan segera datang. Di kampung-kampung, di dalam rumah-rumah adat, orang membangun sendiri imaji-imajinya tentang segala hal dan simbol-simbol untuk memberikan afirmasi bahwa kini kemerdekaan hanya menunggu waktu dalam hitungan hari.

Pada saat menjelang “Dialog Nasional” antara Presiden Habibie dengan perwakilan rakyat Papua, orang Papua sudah yakin bahwa Habibie akan memberikan kemerdekaan bagi rakyat Papua sebagaimana Habibie “memberikannya” untuk Timor Timur. Oleh karena itu ketika saatnya tiba, pada 26 Februari 1999, Tim 100 sebagai wakil rakyat Papua di Istana Negara menyatakan aspirasinya untuk memisahkan diri dari NKRI. Presiden Habibie diminta untuk mengakui kedaulatan Papua Barat sebagaimana sudah diproklamasikan pada 1 Desember 1961. Selain itu delegasi juga menyatakan untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Habibie hanya bisa menjawab bahwa permintaan itu perlu direnungkan kembali.<sup>59</sup>

Situasi pasca Dialog Nasional di Papua semakin diramaikan oleh keyakinan rakyat akan datangnya kemerdekaan. Sosialisasi hasil dialog nasional lebih merupakan pengembangan hasil interpretasi ulang atas peristiwa di Istana Negara dan “pencocokan” keyakinan mitis rakyat akan datangnya jaman baru. Satgas-satgas Papua mulai dibentuk. Dari sini sudah dapat dikatakan bahwa arena dan isu pertarungan bergeser total dari kelompok Pro-Demokrasi versus dominasi TNI menjadi “separatisme” versus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pergeseran ini dapat dikatakan bahwa kondisi subyektif dan obyektif politik yang tercipta dan pertarungan dapat kembali dengan leluasa dikendalikan oleh TNI. Isu-isu HAM dan demokratisasi tidak lagi mendapat tempat baik di dalam media massa maupun di dalam wacana yang berkembang di kalangan masyarakat Papua.

### **2.3. Siklus Baru Kekerasan dan Dominasi Aparat Bersenjata**

Provokasi ke arah kekerasan dengan bendera suku bangsa maupun agama secara kronologis paralel dengan pembalikan isu politik dari HAM dan demokratisasi ke separatisme. Tanda itu dapat dibaca saat beredar selebaran dua versi di Jayapura pada Senin-Selasa, 8-9 Juni 1998, pada saat mana isu HAM dan demokrasi sedang memuncak. Versi I yang ditujukan kepada umat Muslim bahwa kaum Kristen akan melakukan pembakaran masjid. Sebaliknya Versi II yang ditujukan kepada kaum Kristen menyatakan bahwa pihak Islam akan melakukan

<sup>58</sup> Hasil laporan investigasi Els-HAM Irian Jaya, 1998.

<sup>59</sup> Lihat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 2001, *Memoria Passionis di Papua: Kondisi HAM dan Gerakan Aspirasi Merdeka, Gambaran 1999*, Jakarta: SKP dan LSPP, hal. 7.

pembakaran gereja. Selebaran beredar tiga hari setelah demo besar di gedung DPRD I menuntut penarikan pasukan TNI di Papua.

Provokasi tersebut tidak berhasil karena diantisipasi dengan cepat oleh para pemimpin dan tokoh agama. Tetapi sembilan hari kemudian, 17 Juni 1998, kekerasan terjadi di tempat lain dengan korban nyawa tiga warga transmigran Arso dan seorang diculik. Menarik bahwa kemudian pada hari yang sama TNI AD menuduh OPM. Kekerasan kemudian terjadi di kampus Uncen antara massa mahasiswa melawan aparat kepolisian dan TNI pada 3 Juli ketika berlangsung demo pro Papua Merdeka. Seorang mahasiswa tewas tertembak, seorang anak kecil tewas terkena peluru nyasar, dan seorang aparat intel dianiaya. Kekerasan yang paling menonjol pada 1998 adalah bentrok antara massa pro Papua Merdeka melawan aparat keamanan. Jumlah korban kekerasan selama 1998 tidak menonjol, "hanya" 9 orang tewas dan 69 luka-luka. Namun pada 1998 ini atmosfer kekerasan sudah sangat terasa. Meskipun jumlah korban tewas hanya 9 orang tetapi terjadi secara merata di Jayapura, Biak, Sorong, Tembagapura, Timika, dan Manokwari. Ketegangan yang dihasilkan oleh kekerasan itu mencolok karena isu yang muncul adalah Papua Merdeka dan isu anti pendatang di kalangan orang Papua.

Pada 1999, di tengah antusiasme rakyat Papua untuk menunjukkan aspirasi kemerdekaannya melalui pengibaran bendera, kekerasan untuk represi politik oleh aparat keamanan masih terbatas. Aspirasi kemerdekaan waktu itu belum berbenturan dengan aparat keamanan karena sebelum dan sesudah Dialog Nasional Habibie dengan Tim 100 tercipta suasana politik yang relatif toleran. Kekerasan paling menonjol terjadi pada 5 Mei 1999 ketika 4 karyawan PTP II Arso terbunuh. Pihak aparat menuduh OPM sebagai pelaku dan pihak masyarakat menuduh kelompok di dalam TNI AD sebagai pelaku. Total korban kekerasan pada 1999 hampir sama dengan 1998, yaitu 9 korban tewas dan sekitar 50 orang luka-luka. Dari 6 kasus kekerasan yang tercatat, 4 kasus di antaranya dilakukan oleh aparat keamanan (3 kasus oleh TNI dan satu kasus oleh polisi). Sisanya adalah kekerasan oleh warga setempat terhadap pendatang.

Memasuki tahun 2000 kekerasan politik kian marak. Total kasus kekerasan sebanyak 37 peristiwa yang terjadi di hampir semua kabupaten di Papua. Korban jiwa 71 orang dan sekitar 220 orang terluka. Ruang politik untuk berekspresi yang kian dibuka oleh Pemerintahan Abdurrahman Wahid ternyata pada satu sisi tidak diimbangi dengan kemampuan aparat pemerintah daerah maupun aparat keamanan untuk menciptakan suasana dialogis melainkan ketegangan dan ketidakpastian. Di dalam institusi keamanan sendiri terdapat kecenderungan kuat untuk resistan terhadap kebijakan persuasif yang dicoba untuk dijalankan oleh pemerintah pusat. Pada sisi lain kelonggaran politik yang tercipta ternyata juga mendorong elemen-elemen masyarakat, terutama di lingkaran kelompok satgas Papua dan sejumlah elemen pemuda, untuk semakin agresif melakukan kekerasan terhadap unsur-unsur negara.

Tidak lama setelah keributan pemilihan Bupati di Serui, pada 28 Januari Satgas Papua dan massa merusak sejumlah bangunan milik pemerintah. Pada 16 Februari di Merauke meledak kerusuhan yang dipicu oleh kampanye otonomi oleh calon bupati. Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) dan kabupaten dirusak. Tiga warga tertembak, satu tewas, dan 21 orang terluka termasuk polisi. Di Nabire pada akhir Februari satuan Brimob bertempur melawan massa rakyat yang berdemo menolak kehadiran Brimob. Tiga warga tewas, 11 luka-luka, dan 2 rumah dibakar oleh massa. Setelah kejadian 18 orang ditahan. Pada 19 Maret Bupati Fakfak dan ajudannya dikeroyok oleh massa rakyat. Akibatnya seorang pengeroyok ditembak dan 26 orang ditangkap. Pada 7 September di Fakfak seorang anggota DPRD II Fakfak yang sedang melakukan kunjungan kerja ke desa dipukuli oleh massa karena dituduh kampanye otonomi. 27 warga desa ditangkap.

Keberanian rakyat menyerang secara fisik tidak hanya terhadap aparat birokrasi sipil tetapi juga pada aparat keamanan. Pada 7 Desember dinihari Mapolsek Abepura diserang oleh kelompok tak dikenal. Seorang polisi tewas dan tiga luka berat. Di bawah pimpinan Kapolres Jayapura penangkapan dilakukan di tiga asrama mahasiswa yang diduga sebagai pelaku. Puluhan orang ditangkap, ditahan, dan disiksa. 2 pelajar tewas di dalam tahanan polisi dan 1 pelajar tewas ditembak oleh Brimob. Peristiwa Abepura ini kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi oleh KPP HAM dari Komnas HAM. Pada 15 Desember Tiga anggota TNI Yonif 713 di Tiom diserang oleh massa setelah menurunkan bendera Bintang Kejora dan menggiring 13

orang penjaga bendera ke Koramil terdekat. Seorang Kopral Dua TNI tewas. Pada hari Natal dua polisi yang sedang menjaga misa Natal diserang 30 massa. 2 pucuk senjata dan 86 butir amunisi dirampas. Kedua polisi korban melarikan diri.

Menyikapi suasana penuh kekerasan ini aparat pun bereaksi dengan lebih keras dan brutal. Pada 25 April di Merauke seorang sersan dua polisi tanpa alasan yang jelas menembak dua anggota satgas Papua. Akibatnya warga setempat mengamuk dan menyerang aparat kepolisian. Pada 1 Juli 29 anggota Brimob menganiaya sejumlah warga sipil di pasar Hamadi Jayapura. Pada 28 Juli di Sorong aparat polisi menembak lima warga sipil yang berdemo menolak kedatangan kapal Dobonsolo yang mengangkut pengungsi Ambon. Di Sorong pada 22 Agustus, massa yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Gereja Emmanuel, bentrok dengan aparat. 3 orang tewas dan 11 luka-luka. Pada 21 September seorang mahasiswa di Jayapura ditikam dengan sangkur yang diduga milik anggota TNI AD. Mahasiswa marah dan menutup jalan Abepura-Sentani. Pada 5 Nopember kerusuhan meledak di Merauke. 5 orang tewas tertembak dan 36 luka-luka. Pada 8 Nopember Manokwari rusuh. 4 orang tertembak. Dua hari kemudian satu anggota satgas Papua tewas ditembak. Pada 19 Nopember di Merauke kembali seorang anggota satgas Papua ditembak mati. Pada 1 Desember, bersamaan dengan pengibaran bendera untuk peringatan “hari kemerdekaan” Papua, di Fakfak polisi memaksa menurunkan bendera. 40 orang warga marah dan bentrok dengan polisi. Dua orang tewas tertembak dan 7 ditangkap. Sehari kemudian di Merauke 100 massa yang marah karena bendera Papua diturunkan, merobek Merah Putih, dan menyerang polisi dengan panah dan tombak. 7 tewas seketika. 2 meninggal di rumah sakit. 12 anggota satgas Papua ditahan.

Di dalam dan di antara aparat keamanan sendiri terjadi kekerasan yang semakin meyakinkan kita betapa kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik juga menjangkiti kalangan aparat. Di antara mereka terjadi perkelahian. Pada 1 Agustus di Timika terjadi penikaman terhadap anggota Brimob oleh anggota TNI AD yang mengundang tawuran baru antara satuan Brimob melawan TNI. Akibatnya 7 orang tertembak termasuk Dandim Mimika. Pada 17 September Danramil Jayapura Utara tewas akibat penganiayaan dalam kasus tawuran antara Brimob melawan Kopassus.

Kekerasan juga melanda kelompok-kelompok masyarakat, terutama antara pendatang dan orang Papua. Di Entrop Jayapura, berawal dari perkelahian pribadi, 300 orang Dani asal Wamena menyerang warga yang bermukim di sekitar terminal Entrop. Satu tewas, 5 luka-luka, dan sejumlah kios dan mobil dibakar. Di Timika empat warga pendatang pencari kayu gaharu dipanah dan ditembak. Menurut Dandim Mimika, kemungkinan pelakunya adalah kelompok OPM pimpinan Kelly Kwalik. Pada 6 Oktober, sehubungan dengan operasi penurunan bendera Bintang Kejora secara paksa, orang Dani di Wamena mengamuk dan menyerang pendatang. 34 warga pendatang tewas mengenaskan. 88 orang terluka. Pada 13 Nopember terjadi perkelahian massal antara warga pendatang yang menghuni pasar Abepura melawan kelompok warga di sekitar pasar dengan menggunakan badik, sumpit, parang dan sejumlah alat peledak. Jumlah korban tidak diketahui. Pada 9 Desember di dekat perbatasan RI-PNG Ma' pang terjadi penganiayaan terhadap pendatang dan penduduk setempat. 2 tewas di tempat. 2 luka parah dan satu orang dipotong-potong dan dibuang ke tempat lain.

Tuntutan Papua untuk merdeka, pengibaran bendera, berbagai kekerasan dan kerusuhan semakin diperkeruh dengan kecenderungan represif di satu pihak dan peningkatan kehadiran pasukan TNI dan kepolisian (Brimob) di pihak lain. Lihat bagaimana penolakan masyarakat pada Brimob dan akibatnya pada keamanan dan eskalasi kekerasan. Lihat juga bagaimana pameran kekuatan TNI tidak berpengaruh membaiknya stabilitas politik di Papua. Peningkatan pasukan baik oleh polisi maupun TNI ternyata justru membuat suasana Papua secara politik semakin panas dan sangat rawan dengan kekerasan. Pasukan menjadi secara berlebihan reaktif. Masyarakat pun sangat reaktif menanggapi sikap dan tindakan aparat pemerintah maupun aparat keamanan.

Jika keberhasilan aparat keamanan diukur dari kemampuannya menciptakan stabilitas sosial dan politik maka aparat keamanan baik polisi maupun TNI AD gagal dalam menjalankan tugasnya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah aparat keamanan sebagai kelompok kepentingan di dalam politik dan ekonomi lebih diuntungkan oleh stabilitas ataukah instabilitas. Secara normatif barangkali dapat dikatakan bahwa aparat keamanan gagal namun dalam konteks Papua

pertarungan dan tujuan praktis aparat keamanan bukan hanya pada penciptaan stabilitas. Wilayah Papua bagi sebagian kelompok di dalam institusi TNI dan kepolisian adalah “tambang emas.” Bisnis keamanan menjadi salah satu motivasi yang cukup kuat bagi aparat keamanan untuk tetap dominan di Papua. Dalam keadaan tidak stabil dapat dipastikan bahwa institusi keamanan akan dengan mudah mempertahankan dominasinya.

Sisi lain adalah keberanian masyarakat untuk melakukan kekerasan terkait dengan aspirasi kemerdekaan dan pandangan mistik di dalamnya. Sejumlah pemuda dan unsur masyarakat, yang sebagiannya menggunakan nama “Satgas Papua” kebanyakan percaya bahwa kemerdekaan sudah pasti dan sedang di ambang pintu sehingga pemerintah dan aparat keamanan harus dilawan habis-habisan agar jalan untuk kemerdekaan semakin mulus. Di dalam pandangan mistik sejumlah kelompok masyarakat adalah adanya kekebalan yang mereka peroleh dari pimpinannya sehingga mereka yakin dapat mengatasi senjata api milik aparat keamanan. Contoh kejadian di Merauke menjelaskan hal ini.

Gejolak sosial politik yang didominasi oleh politik kekerasan di Tanah Papua tampaknya belum akan berakhir. Kekerasan demi kekerasan tetap muncul di berbagai tempat. Pada paruh pertama 2001 tercatat setidaknya 7 (tujuh) peristiwa kekerasan di lima kabupaten baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat keamanan dengan korban tidak kurang dari 19 jiwa.<sup>60</sup> Puluhan orang Papua lainnya ditahan, ditangkap, dianiaya. Pada Juni 2001 di Wasior Manokwari warga bersama OPM menyerang markas polisi. Akibatnya terjadi pembalasan oleh polisi terhadap warga Manokwari yang dicurigai. Berita terakhir menunjukkan kekerasan akan terus berlanjut. Pada awal Oktober 2001 OPM kelompok Dani membunuhanguskan Kecamatan Ilaga Kabupaten Puncak Jaya. Meskipun hanya ada seorang korban tewas, namun dapat dipastikan operasi militer akan dilakukan di Pegunungan Tengah.

Sampai di sini orang Papua tetap akan menjadi bulan-bulanan komplikasi perubahan politik yang didominasi oleh faksi-faksi di dalam institusi negara yang memiliki legalitas untuk menggunakan kekerasan. Potensi untuk melawan penyalahgunaan wewenang oleh militer dan juga oleh polisi melalui lembaga adat dan LSM semakin lemah. Berulangkali himbauan dibuat oleh LSM-LSM seperti Els-HAM Papua, organisasi perempuan, dan bahkan oleh PDP sendiri tetapi tidak efektif. Kelompok-kelompok di Papua, termasuk OPM dan Satgas, serta aparat keamanan, sama-sama memberikan sumbangan terhadap eskalasi kekerasan di Papua.

### 3. Penutup

Pada 1998 ketika Soeharto jatuh dan rejim Orde Baru runtuh, peluang lebih besar terbuka bagi tumbuhnya kepemimpinan sipil dan gerakan Pro-Demokrasi pada umumnya. Tetapi momentum ini tidak melapangkan proses demokratisasi sebaliknya membawa orang Papua kembali pada tradisi gerakan keagamaan kargoisme yang menurut John Strelan sudah teridentifikasi sejak 1860. Pada 1998 gerakan tersebut bangkit kembali di seantero Papua dengan menggunakan wujud baru tuntutan kemerdekaan. Gerakan ini ditandai secara dominan dengan pernyataan tuntutan kemerdekaan dan pengibaran bendera. Gerakan Pro-Demokrasi mulai kehilangan momentumnya ketika pengibaran bendera semakin marak, isu HAM tenggelam, dan pimpinan terkemuka Amungme dan sekaligus Papua Thomas Beanal dalam acara tatap muka dengan Presiden Habibie pada Februari 1999 menuntut dikembalikannya kemerdekaan Papua dan menolak berpartisipasi dalam Pemilu 1999.

Arah politik di atas yang dibangun dengan susah payah oleh kalangan Pro-Demokrasi di Papua dan di Jakarta mulai berbelok tajam ke arah sebaliknya. Pada Juli 1998 di Papua marak pengibaran bendera di banyak kabupaten secara susul menyusul. Isu kemerdekaan Papua dan separatisme menjadi jauh lebih dominan dan menenggelamkan isu HAM dan demokrasi. Maraknya kembali isu “M” ini dipicu oleh Dialog Nasional Rakyat Papua dengan Presiden Habibie pada Februari 1999. Sejak dialog nasional diadakan berkembang pesat di kalangan rakyat Papua bahwa kemerdekaan akan segera diberikan oleh Habibie.

---

<sup>60</sup> Lihat “Seruan Penghentian Tindak Kekerasan di Tanah Papua,” Jayapura, 14 Juni 2001, ditandatangani oleh Ketua Sinode GKI, GKII, GIDI, Gereja Baptis, Uskup Jayapura, dan Ketua MUI Papua.

Revivalisme gerakan keagamaan ini mengakibatkan dua hal. Pada satu sisi gerakan Pro-Demokrasi yang mulai tumbuh menjadi surut kembali tergilas oleh suatu gelombang besar demam aspirasi kemerdekaan. Selain antusiasme dan keyakinan rakyat bahwa akan datang kemakmuran baru setelah lepas dari Indonesia, gerakan Pro-Demokrasi di Papua tidak mempunyai kemampuan berkontes dengan gelombang tersebut. Pada sisi lain revivalisme yang menggunakan simbol-simbol separatisme ini menguntungkan dominasi politik dan ekonomi kelompok militer di Papua. TNI kembali memperoleh legitimasi untuk tetap beroperasi dan bahkan memperbesar jumlah pasukannya di Papua. Dengan kehadirannya, militer memiliki keleluasaan cukup untuk mempertahankan kepentingan dominasinya di Papua.

Kecenderungan ini sesungguhnya melemahkan perjuangan masyarakat sipil dan menguntungkan pihak militer. Gerakan-gerakan yang mengagendakan perlawanan terhadap dwifungsi militer dan demokratisasi dalam bentuk pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) dan penarikan pasukan nonorganik dari Papua dengan sendirinya tenggelam. Dominasi aspirasi "M" dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengannya dengan mudah dikategorikan sebagai "makar" atau "separatis." Kenyataan ini membuat militer mendapatkan dukungannya kembali dari Jakarta. Tidak kurang DPR RI, ahli hukum tata negara, bahkan pihak pemerintah pusat yang sebelumnya toleran dan persuasif juga membuat tuduhan separatis. Dukungan ini membatalkan upaya untuk menarik pasukan militer nonorganik dari Papua. Bahkan kenyataan ini membuat militer tidak mendapatkan halangan untuk menambah jumlah pasukan nonorganiknya. Sementara itu sejalan dengan kebijakan untuk memperbesar peran kepolisian, pasukan Brimob juga memadati daerah-daerah yang dinilai rawan.

Penyelesaian politik di Papua mengalami kebuntuan yang serius. Kekerasan menjadi kendala pertama dan utama. Setiap kasus kekerasan baik yang dilakukan oleh TNI, polisi, Satgas Papua, OPM, pendatang, atau kelompok masyarakat lainnya memberikan sumbangan pada penyempitan ruang dialog baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Polisi terutama Brimob semakin tidak imparisial dan obyektif dalam menegakkan hukum tatkala semakin banyak anggotanya juga menjadi korban kekerasan. Di antara polisi dan TNI pun tidak dapat diharapkan menjalankan fungsinya secara profesional karena konflik kepentingan di antara mereka sendiri dan kecenderungan untuk menyalahgunakan kekerasan.

Dominasi kekerasan sebagai jawaban setiap masalah juga memperkecil ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program-program pembangunan yang dapat memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat Papua. Kalau pun UU otonomi khusus untuk Papua sudah dinyatakan berlaku, hampir dapat dipastikan bahwa pengembangan dan pembangunan di Papua mengalami kendala sangat besar. Pertama, birokrasi pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten, dan kecamatan mengalami kelumpuhan dan disfungsi. Kedua, kenyataan itu diperburuk oleh ketidakpercayaan rakyat Papua pada birokrasi dan kecenderungan resisten terhadap program-program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Jalan ke arah dialog, negosiasi, rekonsiliasi, dan praktik politik bersama yang lebih demokratis masih tetap merupakan mimpi. Yang paling mungkin dapat dibayangkan dari perkembangan politik di Papua adalah pertarungan-pertarungan politik yang mengandalkan kekerasan. Kehadiran TNI dan polisi akan semakin massif dan intensif di Papua dengan alasan untuk memerangi OPM. Ini berarti perluasan ruang-ruang kekerasan baru. Kebencian warga Papua terhadap pendatang pada satu sisi, dan ketakutan pendatang pada orang Papua pada sisi lainnya, akan semakin berkembang karena kemampuan politik kedua pihak yang lemah sehingga tidak terjadi negosiasi politik. Kekerasan warga Papua terhadap pendatang akan dibalas pula oleh pendatang dengan teknologi kekerasan yang barangkali lebih mematikan.

Akankah Papua berhasil merdeka sebagai negara sendiri atau kah ia akan tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia? Jawabannya barangkali masih jauh dan butuh waktu, tetapi pada saat yang sama korban jiwa akan terus berjatuhan. Setiap kekerasan yang satu akan mengundang kekerasan lainnya. Semakin banyak kekerasan itu semakin tumpul inisiatif-inisiatif untuk membangun dialog, negosiasi, dan penyelesaian yang damai dan adil. Sementara itu upaya untuk membangun demokrasi dan perdamaian harus kembali dibangun dari puing-puing kekerasan itu.

\*\*\*



## DAFTAR ACUAN

- Aditjondro, George, 1986, "Transmigration in Irian Jaya: Issues, Targets, and Alternative Approaches," Amsterdam 28-29 April. Makalah tak terbit.
- Aditjondro, George, 1986, "Suatu Telaah Dampak Migrasi Suku-suku Bangsa dari Sulawesi Selatan dan Tenggara ke Irian Jaya" Laporan Seminar Pengembangan SDM di Irian Jaya, Jakarta: LRKN LIPI, hal. 26-47.
- Beanal, Tom., 1997, Amungme: *Magaboarat Negel Jombe-Peibe*, Jakarta: WALHI, hal.57-62.
- Broek, Theo van den, ofm., dan J. Budi Hernawan, ofm., Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 2001, *Memoria Passionis di Papua: Kondisi HAM dan Gerakan Aspirasi Merdeka, Gambaran 1999*, Jakarta: SKP dan LSPP.
- Budiardjo, Carmel, dan Liem Soei Liong, 1988, *West Papua: the Obliteration of a People*, London: Tapol.
- Djopari, John R.G., 1993, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: Grasindo)
- Dokumen January Agreement 1974 "Result achieved by Freeport Inc.'s settlement team with the local people on 5-11 January 1974 at Tembagapura," disertai lampiran.
- ELS-HAM Irian Jaya, Hasil laporan investigasi 1998.
- ELS-HAM Papua, "Menyimak Peta Potensi Konflik di Papua Barat," Analisis intern tak terbit, Jayapura, tanpa tanggal.
- Giay, Benny., 1986, *Kargoisme di Irian Jaya*, Jayapura: Region Press.
- Heider, Karl G., 1970, *The Dugum Dani: A Papuan culture in the highlands of West New Guinea*, Chicago: Aldine Publishing Co.
- Kafiar, August. dkk. (1997?), Peranan PT Freeport Indonesia Company dalam Pembangunan Masyarakat dan Daerah Irian Jaya, Makalah Tak Terbit.
- Kamma, Freerk Ch., 1972, *Koreri: Messianic Movements in the Biak-Numfor Culture Area*, The Hague: Martinus Nijhoff.
- Ketua Sinode GKI, GKII, GIDI, Gereja Baptis, Uskup Jayapura, dan Ketua MUI Papua., "Seruan Penghentian Tindak Kekerasan di Tanah Papua," Jayapura, 14 Juni 2001.
- Labat-Anderson Inc. 1996, Draft of Technical Results Social Audit of PT Freeport Indonesia, Jakarta.
- Labat-Anderson Inc. 1997, Final Social Audit FT Freeport Indonesia, Jakarta.
- LEMASA, 1998, Bella dan Alama Berdarah, Timika: Laporan Investigasi HAM tak terbit.
- Mansoben, Johsua., *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*, Jakarta-Leiden: LIPI-RUL
- May, Brian., 1978, *The Indonesian tragedy...*
- Mealey, George, 1996, *Grasberg*, Freeport-McMoran Copper and Gold Inc., New Orleans.
- Osborne, Robin., 1986, "OPM and the quest for West Papuan unity", dalam R.J. May (ed.) *Between two nations*, Australia: Robert Brown and Associates.
- Patty, S.A., "Penduduk Dani Barat dan Pembangunan", dalam E.K.M. Masinambow dan Paul Haenen (eds.), 1994, *Kebudayaan dan Pembangunan di Irian Jaya*, Jakarta: LIPI-RUL.
- Pigay, Decki Natalis., 2000, *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Schoorl, J.W., 1997, *Kebudayaan dan Perubahan Suku Muyu dalam Arus Modernisasi di Irian Jaya*, Jakarta: Gramedia dan KITLV.
- Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, 2001, "Kronik Politik Papua 2000".
- Strelan, John G. dan Jan Godschalk, 1989, *Kargoisme di Melanesia*, Jayapura: Pusat Studi Irian Jaya.
- Strelan, John G., 1977, *Search for salvation*, Adelaide: Lutheran Publishing House.
- Widjojo, Muridan S., "Puisi Pengharapan Bintang Kejora", dalam *Tempo*, 22 Oktober 2000.
- Widjojo, Muridan S., 1997, *Orang Kamoro dan Perubahan Lingkungan Sosial Budaya di Timika, Irian Jaya*, Jakarta: LIPI.
- Widjojo, Muridan S., 2002, Strategi Amungme untuk Memperoleh Pengakuan di Mimika, Papua. Tesis MA Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.

## Surat Kabar

- Bernas, 3 Juli 1998.
- Bisnis Indonesia, , 4 Juli 1998
- Cenderawasih Pos, 10 Juni 1998.
- Cenderawasih Pos, 11 Juli 1998.
- Cenderawasih Pos, 19 Juni 1998.
- Cenderawasih Pos, 3 Juni 1998.

Cenderawasih Pos, 30 Mei 1998.  
Cenderawasih Pos, 30 Mei 1998.  
Cenderawasih Pos, 4 Juli 1998.  
Cenderawasih Pos, 5 Juni 1998.  
Cenderawasih Pos, 6 Juni 1998.  
Cenderawasih Pos, 6 Juni 1998.  
Cenderawasih Pos, 7 Juli 1998.  
Cenderawasih Pos, 8 Juli 1998.  
Cenderawasih Pos, 8 Juli 1998.  
Kompas, 'Mozes Kilangin, Pembawa Damai di Timika' 25 Agustus 1991  
Kompas Online, "Jenazah Kopral Diusung ke DPRD Papua," 21/7/2000.  
Kompas, "Ketika Papua Ditinggalkan Pimpinan," 31 Januari 2000.  
Kompas, 4 Juli 1998  
Kompas, "Jenazah Kopral diusung ke DPRD Papua," 22 Juli 2000.  
Kompas, "Papuanisasi Segera Dimulai di Papua," 22 Juni 2000.  
Kompas, "Tunda, Transmigrasi ke Papua," 11 Februari 2000.  
Kompas, 19 Juni 1998.  
Media Indonesia, , 4 Juli 1998  
Suara Pembaruan, 18 Juni 1998  
Suara Pembaruan, 3 Juli 1998.  
The Jakarta Post, 4 Juli 1998.